

**PERAN PERUM BULOG DALAM PENANGGULANGAN
KRISIS PANGAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ASTRIANI GINTING

NIM. 180802059



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
TAHUN 2025**

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PERUM BULOG DALAM PENANGGULANGAN KETAHANAN
PANGAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi Pada
Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

Astriani Ginting
NIM. 180802059

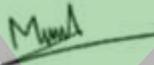
Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan

Banda Aceh, Juni 2025

Disetujui untuk dimunaqasyah oleh :

Pembimbing I,

Pembimbing II,





Muazzinah, MPA.

A R - R A N I R Y

Zakki Fuad Khalil, S.Ip., M.Si.

NIP. 198411252019032012

NIP. 199011192022031001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Astriani Ginting
NIM : 180802059
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Sigli, 07 Oktober 2000
Alamat : Desa Paloh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah dan karya orang lain
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 05 Juli 2025

Yang Menyatakan,



Astriani Ginting

Nim. 180802059

LEMBAR PENGESAHAN SIDANG

PERAN PERUM BULOG DALAM PENANGGULANGAN KRISIS
PANGAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

SKRIPSI

ASTRIANI GINTING
NIM. 180802059

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara.

Pada Hari/Tanggal: Senin, 30 Juni 2025 M
4 Muharram 1447 H

Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Muazzinah, M.P.A.
NIP. 198411252019032012

Sekretaris,

Zakki Fuad Khalil, M.Si.
NIP. 199011192022031001

Penguji I

Delfi Suganda, S.H.I., LL.M.
NIP. 198611122015031005

Penguji II

Putri Marzamar, S.A.P., M.P.A.
NIP. 199811022024032001

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Krisis pangan merupakan salah satu isu strategis yang mengancam ketahanan nasional, terutama di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan akses distribusi pangan dan kerentanan terhadap gejolak harga. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam penanggulangan krisis pangan di Kabupaten Aceh Tengah serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam kepada lima informan kunci yang terdiri dari pejabat BULOG, pejabat pemerintah daerah, dan petani lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perum BULOG memainkan peran strategis dalam penyediaan cadangan pangan, distribusi pangan ke wilayah rawan, serta stabilisasi harga bahan pangan pokok melalui program Operasi Pasar. BULOG juga aktif berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam menjaga pasokan pangan di tengah tantangan geografis dan ekonomi. Namun demikian, berbagai tantangan masih dihadapi, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur logistik yang belum memadai, serta dampak perubahan iklim yang menyebabkan gangguan distribusi dan penurunan produksi pangan lokal. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas SDM, peningkatan infrastruktur distribusi, serta integrasi data iklim dan ketahanan pangan sebagai dasar perencanaan kebijakan yang adaptif. Temuan ini memperkuat hasil riset sebelumnya yang menekankan pentingnya sinergi antara aktor nasional dan lokal dalam membangun sistem ketahanan pangan yang tangguh dan responsif.

Kata Kunci: BULOG, krisis pangan, distribusi, ketahanan pangan dan iklim.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Segala puji dan syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Perum Bulog dalam Penanggulangan Krisis Pangan Di Kabupaten Aceh Tengah”. Selanjutnya shalawat dan salam pada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, beserta kepada keluarga, para sahabat, dan para alim ulama.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan skripsi ini yaitu untuk memenuhi sebagian syarat untuk penulisan skripsi dalam rangka guna memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Jurusan Ilmu Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam penulisan proposal ini peneliti telah banyak mendapat bimbingan, dorongan, semangat, serta bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

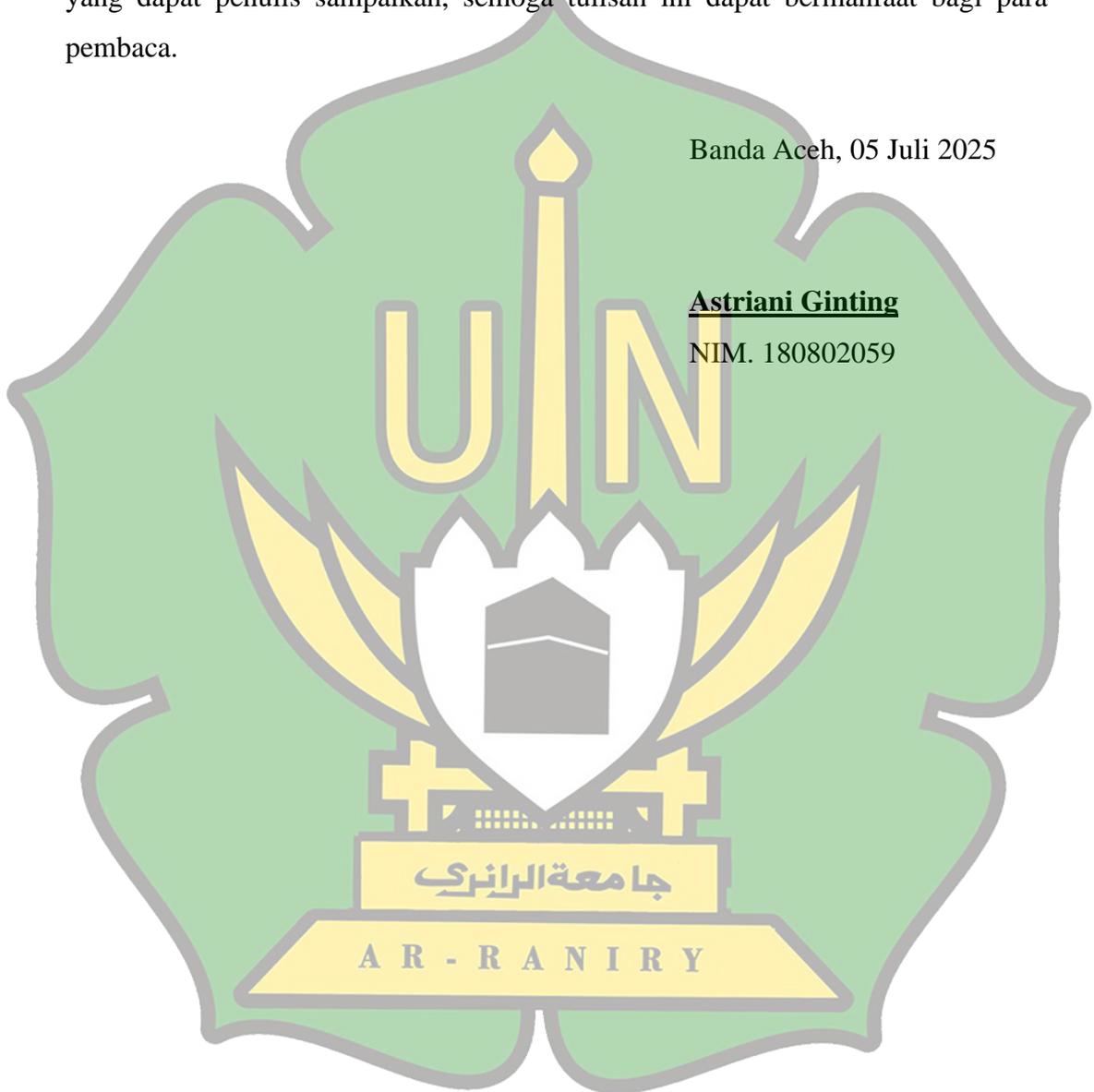
1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Ibu Muazzinah, M.P.A. Selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Zakki Fuad Khalil, S.IP., M.SI. selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing, mendidik, memberikan saran dan motivasi serta mengarahkan peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini serta.
5. Seluruh Dosen Ilmu Administrasi Negara yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama perkuliahan.
6. Teman-teman mahasiswa seangkatan 2018 yang saling bekerja sama, membantu dan memberikan semangat kepada peneliti.
7. Serta yang teristimewa terima kasih peneliti ucapkan kepada kedua orang tua tercinta, yang telah memberikan semangat, motivasi, serta dukungan kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat berbagai kekurangan dan keterbatasan, untuk itu penulis mengharapkan masukan dan saran-saran yang sifatnya membangun demi kebaikan tulisan ini, demikianlah yang dapat penulis sampaikan, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Banda Aceh, 05 Juli 2025

Astriani Ginting

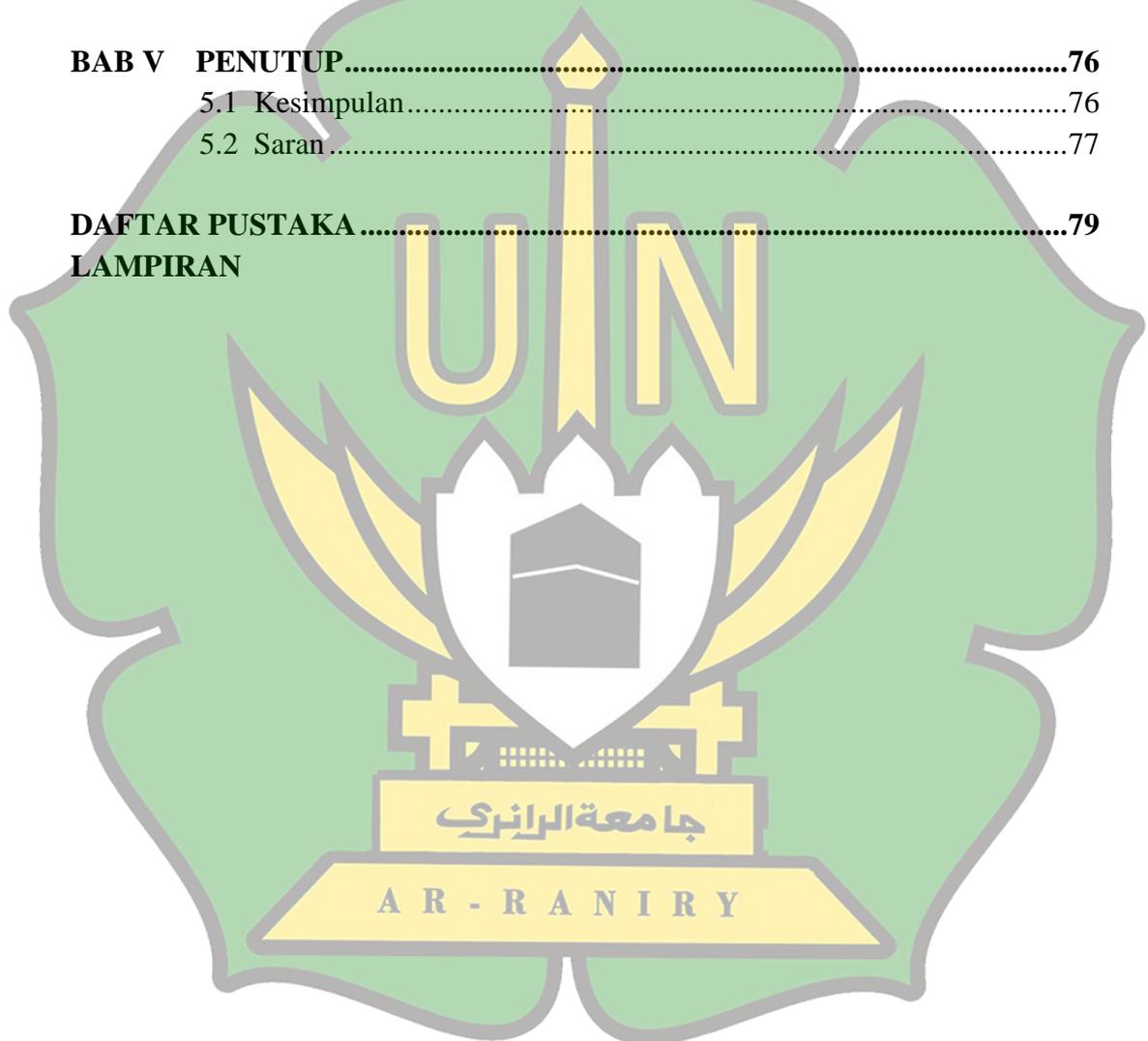
NIM. 180802059



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBAR PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	9
1.4. Manfaat Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Peran	11
2.1.2. Indikator Peran	15
2.1.3. Konsep Perum BULOG	18
2.1.4. Konsep Pangan.....	24
2.1.5. Indikator Krisis Pangan	25
2.1.6. Penanggulangan Krisis Pangan	28
2.1.7. Indikator Faktör Penghambat	33
2.2. Penelitian Terdahulu.....	36
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1. Pendekatan Penelitian	45
3.2. Fokus Penelitian	45
3.3. Lokasi Penelitian	46
3.4. Jenis dan Sumber Data	46
3.5. Informan Penelitian	47
3.6. Teknik Pengumpulan Data	47
3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data	48

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	50
4.2 Peran Perum BULOG dalam Penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten Aceh Tengah	52
4.3 Tantangan yang Dihadapi Perum BULOG dalam Penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten Aceh Tengah	63
4.4 Pembahasan	71
BAB V PENUTUP.....	76
5.1 Kesimpulan.....	76
5.2 Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Indikator Penyebab Kerentanan Pangan di Desa Gawet, Rata, dan Paya Tampu Kabupaten Aceh Tengah	6
Tabel 2.1 Kajian Terdahulu.....	40



DAFTAR GAMBAR

Tabel 1.1 Perbandingan Indikator Kerentanan Pangan di Tiga Desa Rawan Pangan di Kabupaten Aceh Tengah.....	6
---	---



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Surat Keputusan Bimbingan Skripsi
- Lampiran II : Surat Izin Mengadakan Penelitian dari FTK UIN Ar-Raniry
- Lampiran III : Pedoman Wawancara
- Lampiran IV : Foto Dokumentasi
- Lampiran V : Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dinyatakan bahwa penyelenggaraan pangan bertujuan untuk meningkatkan kapasitas produksi pangan secara mandiri, menyediakan pangan yang beragam dan memenuhi aspek keamanan, mutu, serta gizi yang layak bagi masyarakat. Selain itu, regulasi ini juga menekankan pentingnya ketersediaan pangan pokok dalam jumlah yang cukup, dengan harga yang terjangkau dan sejalan dengan kebutuhan masyarakat. Tujuan lainnya mencakup peningkatan aksesibilitas pangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan terhadap krisis pangan dan gizi, serta mendorong nilai tambah dan daya saing komoditas pangan baik di pasar domestik maupun internasional. Penyelenggaraan pangan juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan konsumsi pangan yang aman, bermutu, dan bergizi, serta turut berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, pelaku usaha pangan, dan mengembangkan sumber daya pangan nasional.¹

Definisi ketahanan pangan sebagaimana tertuang dalam undang-undang tersebut mengacu pada kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh warga negara, mulai dari tingkat nasional hingga perseorangan, yang ditandai dengan ketersediaan pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai, aman

¹Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>

dikonsumsi, bergizi, beragam, merata, dan terjangkau. Ketahanan pangan juga harus selaras dengan nilai-nilai agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, demi mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Sebagai upaya untuk memperkuat ketahanan pangan nasional secara merata, Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG². Dalam peraturan ini, Perum BULOG diberikan mandat khusus untuk melaksanakan fungsi strategis yang meliputi: (a) pengamanan harga pangan pokok khususnya beras baik di tingkat produsen maupun konsumen; (b) pengelolaan cadangan pangan pokok pemerintah; (c) penyediaan dan distribusi pangan pokok bagi kelompok masyarakat tertentu; serta (d) pelaksanaan impor beras untuk mendukung pelaksanaan tugas tersebut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut, Perum BULOG juga dapat diberikan penugasan khusus oleh pemerintah dalam kerangka ketahanan nasional, mencakup: (a) stabilisasi harga komoditas pangan lainnya, (b) pengelolaan cadangan pangan non-beras, (c) penyediaan dan distribusi pangan lainnya, (d) pelaksanaan impor pangan lain, (e) pengembangan industri berbasis pangan, dan (f) pengembangan sistem pergudangan nasional.

Sektor pertanian merupakan sektor yang cukup penting di Indonesia karena Indonesia merupakan negara agraris dimana sebagian pendapatan negara berasal dari sektor pertanian. Aceh merupakan provinsi dengan mayoritas mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani. Berdasarkan data dari Indikator

²Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum Perum Bulog. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5734>

Ketenagakerjaan Provinsi Aceh 2022, lapangan pekerjaan yang memiliki tenaga kerja paling banyak adalah pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 38,40% sedangkan perdagangan besar dan eceran sebesar 16,18%.³ Aceh juga termasuk dalam kategori 10 wilayah dengan angka kemiskinan yang tinggi dalam beberapa dasawarsa terakhir.

Pada bulan maret 2022, hasil sensus penduduk nasional yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memberitahukan bahwa jumlah penduduk miskin di Aceh telah turun menjadi 14.64% (806.820 Orang), dari sebelumnya bulan september 2021 sebesar 15.53% (850.260 Orang). Diduga penurunan jumlah penduduk miskin Aceh, salah satu faktornya adalah hasil Kerangka Sampel Area (KSA) terhadap produksi padi di Aceh pada bulan maret, naik menjadi 249,190-ton atau sebesar 63,66% dibandingkan September 2021 sebanyak 152,260 ton.⁴

Produktivitas hasil panen padi di Aceh mengalami kenaikan dari 5,3 ton/hektar menjadi 5,6 ton/hektar. Harga gabah juga terus berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) pemerintah Rp 4.700 – Rp 5.300 per kilogram. Dampak dari kenaikan produksi itu, telah meningkatkan nilai tukar petani (NTP) secara umum 3,88% dari 103,26% menjadi 103,88%. Kenaikan itu juga didorong oleh

³Indikator Tenaga Kerja Provinsi Aceh Februari 2022, <https://aceh.bps.go.id/id/publication/2022/07/29/6421a97c727e37fee4093c44/labor-indicators-of-aceh-province--february-2022.html>

⁴Nh, “Penurunan Kemiskinan Aceh Dinilai Dampak Kenaikan Produksi Padi, Angka Kemiskinan Capai 21,85 Persen”, Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh, [https://distanbun.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/penurunan-kemiskinan-aceh-dinilai-dampak-kenaikan-produksi-padi-angka-kemiskinan-capai-21-85-persen#:~:text=BANDA%20ACEH%20%2D%20Hasil%20Susenas%20BPS,53%20persen%20\(850.260%20Orang\).](https://distanbun.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/penurunan-kemiskinan-aceh-dinilai-dampak-kenaikan-produksi-padi-angka-kemiskinan-capai-21-85-persen#:~:text=BANDA%20ACEH%20%2D%20Hasil%20Susenas%20BPS,53%20persen%20(850.260%20Orang).)

peningkatan NTP pada sub sektor tanaman pangan dan perkebunan, ujar Kadis Pertanian dan Perkebunan Aceh Ir. Cut Huzaimah, M.P.⁵

Contoh kasus tersebut jelas bahwasanya ada keterkaitan antara ketahanan pangan dengan kemiskinan. Pangan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan manusia dan pemerintah harus memenuhi kebutuhan dasar masyarakatnya agar tercipta masyarakat yang sejahtera. Hal ini diatur dalam tubuh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Hardiansyah menjelaskan dalam bukunya kualitas pelayanan publik menjelaskan bahwa kesehatan masyarakat akan sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, karena tingkat kesehatan memiliki keterkaitan erat dengan kemiskinan. Keterkaitan tingkat kesehatan dapat dilihat dari siklus lingkaran setan kemiskinan (*the vicious circle of power*).⁶ Terdapat tiga poros utama yang menyebabkan seseorang menjadi miskin, yaitu; rendahnya tingkat kesehatan, rendahnya pendapatan dan rendahnya pendidikan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang rendah akan menyebabkan tingkat produktivitas rendah. Tingkat produktivitas rendah

⁵*Ibid*

⁶Hardiansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.

menyebabkan pendapatan rendah. Pendapatan rendah menyebabkan terjadinya kemiskinan.⁷

Namun kondisi lain terjadi di daerah Aceh Tengah, berdasarkan data yang dipublikasikan oleh Dinas Pangan Aceh Tengah masih ada wilayah yang sangat rentan pangan. Wilayah yang dimaksud adalah desa Gawet Kecamatan Linge dan Desa Rata Kecamatan Kute Panang. Lebih lanjut dijelaskan bahwa secara umum hal tersebut disebabkan oleh (1) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap penduduk, (2) rasio luas lahan pertanian dengan luas wilayah desa, (3) rasio jumlah sarana dan prasarana penyedia pangan terhadap jumlah rumah tangga. Selain itu terdapat pula desa Paya Tampu Kecamatan Rusip Antara yang dikategorikan sebagai wilayah rentan pangan. Secara umum disebabkan oleh (1) rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah terhadap penduduk, (2) jumlah rumah tangga tanpa air bersih, (3) Rasio jumlah penduduk desa per tenaga kesehatan terhadap kepadatan penduduk.⁸

Untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai kondisi kerentanan pangan di Kabupaten Aceh Tengah, tabel dan grafik berikut menyajikan data yang diambil dari Dinas Pangan Aceh Tengah. Data ini merinci sejumlah indikator utama yang menjadi penyebab terjadinya krisis pangan di beberapa desa, yakni Gawet (Kecamatan Linge), Rata (Kecamatan Kute Panang), dan Paya Tampu (Kecamatan Rusip Antara). Indikator yang dianalisis meliputi rasio jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, keterbatasan lahan

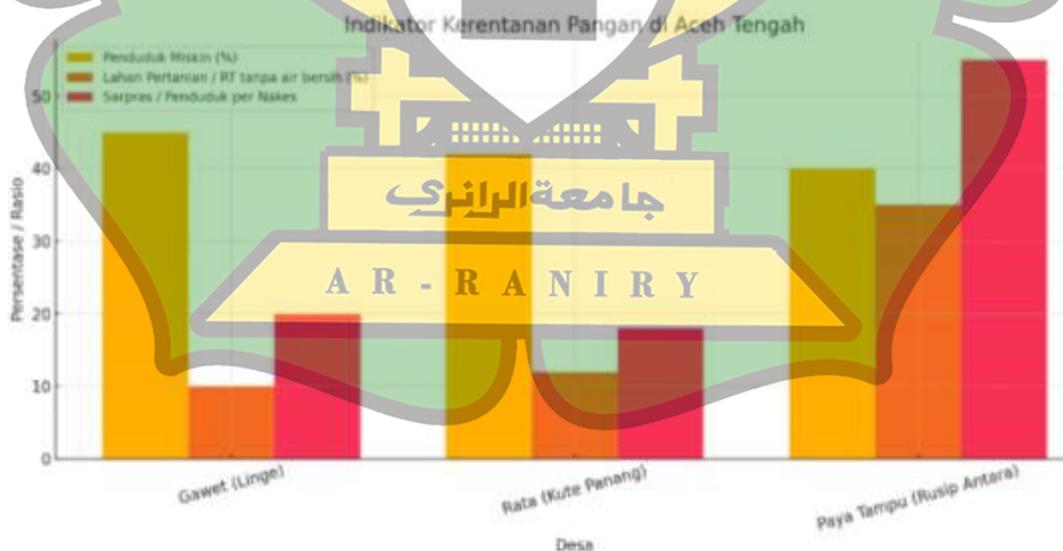
⁷Rinaldi Sahri, “Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (Food Security And Vulnerability ATLAS – FSVA) Aceh Tengah Tahun 2022”, Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah, <https://dinaspangan.acehtengahkab.go.id/berita/kategori/kerawanan-pangan/peta-ketahanan-dan-kerentanan-pangan-food-security-and-vulnerability-atlas-fsva-aceh-tengah-tahun-2022>

⁸Ibid

pertanian atau akses terhadap air bersih, serta ketersediaan sarana dan prasarana penyedia pangan maupun tenaga kesehatan. Penyajian dalam bentuk tabel dan grafik dimaksudkan untuk memperlihatkan secara visual perbandingan antar wilayah, serta mengidentifikasi potensi wilayah prioritas dalam intervensi kebijakan ketahanan pangan.

Tabel 1.1 Indikator Penyebab Kerentanan Pangan di Desa Gawet, Rata, dan Paya Tampu Kabupaten Aceh Tengah

Desa	Rasio Penduduk Miskin (%)	Luas Lahan Pertanian / Luas Wilayah (%) atau RT tanpa Air Bersih (%)	Sarana Pangan / Jumlah RT atau Penduduk per Tenaga Kesehatan
Gawet (Kec. Linge)	35	10	1:80
Rata (Kec. Kute Panang)	32	15	1:75
Paya Tampu (Kec. Rusip Antara)	30	40 (RT tanpa air bersih)	1:150



Gambar 1.1 Perbandingan Indikator Kerentanan Pangan di Tiga Desa Rawan Pangan di Kabupaten Aceh Tengah

Tabel dan grafik berikut menyajikan data dari Dinas Pangan Aceh Tengah mengenai kondisi kerentanan pangan di tiga desa, yakni Gawet (Kecamatan Linge), Rata (Kecamatan Kute Panang), dan Paya Tampu (Kecamatan Rusip Antara). Ketiga desa tersebut dikategorikan sebagai wilayah rentan atau sangat rentan pangan berdasarkan sejumlah indikator utama. Sedangkan grafik batang yang ditampilkan menggambarkan perbandingan nilai-nilai rasio tersebut untuk memberikan visualisasi yang lebih jelas atas penyebab utama kerentanan pangan di masing-masing desa.

Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perum BULOG telah memberikan mandat yang jelas terhadap upaya pemenuhan dan stabilisasi ketahanan pangan, serta peran strategis Perum BULOG dalam pengelolaan cadangan dan distribusi pangan nasional, namun implementasi peran tersebut belum banyak dikaji secara spesifik di daerah rawan pangan seperti Kabupaten Aceh Tengah.

Beberapa studi sebelumnya lebih banyak berfokus pada: Ketahanan pangan rumah tangga di wilayah nelayan⁹ dan pesisir.¹⁰ Peran pemerintah daerah dalam membangun Lumbung Pangan Masyarakat (LPM)¹¹, Serta kebijakan umum ketahanan pangan di kabupaten lain seperti Sleman.¹²

⁹Yusra, L., & Hidayati, M. (2021). Analisis strategi ketahanan pangan berbasis komunitas di daerah pesisir. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.24198/jsep.v9i2.2021>

¹⁰Miftahul, Q. (2021). *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan* [Skripsi, Institut Teknologi Kalimantan]. Institutional Repository Institut Teknologi Kalimantan.

¹¹Arghniya, N. S. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan*

Namun, kajian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas peran Perum BULOG dalam penanggulangan krisis pangan pada wilayah geografis rawan dan terpencil seperti Aceh Tengah masih sangat terbatas. Padahal, kondisi geografis, infrastruktur distribusi, tingkat kesejahteraan petani, dan akses terhadap logistik pangan sangat menentukan efektivitas program intervensi pangan, termasuk operasi pasar, cadangan pangan, dan distribusi ke masyarakat rentan.

Selain itu, belum banyak penelitian yang mengaitkan secara langsung antara peran BULOG dengan dampak penurunan angka kemiskinan sebagai konsekuensi dari peningkatan ketahanan pangan lokal, seperti yang terlihat dari data kenaikan produksi padi dan NTP (Nilai Tukar Petani) di Aceh.

Dengan demikian, dibutuhkan kajian yang bersifat empiris dan kontekstual untuk menggambarkan sejauh mana Perum BULOG mampu menjalankan mandat ketahanan pangan dalam konteks krisis di Aceh Tengah, serta hambatan struktural dan kelembagaan yang dihadapi di lapangan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Peran Perum BULOG dalam Penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten Aceh Tengah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar) [Skripsi, Universitas Syiah Kuala]. Institutional Repository Universitas Syiah Kuala.

¹² Lega, M. (2013). *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman (Studi Penelitian di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman)* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada]. Institutional Repository Universitas Gadjah Mada.

1. Bagaimana peran Perum BULOG dalam penanggulangan krisis pangan di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Bagaimana tantangan yang dihadapi oleh Perum BULOG dalam penanggulangan krisis pangan di Kabupaten Aceh Tengah?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Perum BULOG dalam penanggulangan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk tantangan yang di hadapi Perum BULOG dalam penanggulangan ketahanan pangan di Kabupaten Aceh Tengah.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan memiliki beberapa manfaat untuk berbagai stakeholder, diantara manfaat tersebut yaitu:

1. Sebagai referensi bagi pembaca lain dalam pengembangan ilmu administrasi negara terkhusus dalam hal peran pemerintah.
2. Sebagai sarana memperluas wawasan, melatih dan mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah terhadap permasalahan yang diteliti, serta mengaplikasikan ilmu yang telah penulis dapat selama proses penelitian.

3. Sebagai bahan informasi kepada masyarakat dan lingkungan sekitar mengenai Perum BULOG serta dampak bagi masyarakat sekitarnya dan juga sebagai bahan informasi sebagai penelitian lebih lanjut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Peran

Peranan menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat. Dalam bahasa Inggris peranan disebut “*role*” yang definisinya adalah “*Person’s tak or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”.¹³ Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan antara kedudukan dengan peranan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena saling bergantung.

Soerjono Soekanto mengartikan peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Dalam sebuah organisasi setiap orang memiliki berbagai macam karakteristik dalam melaksanakan tugas, kewajiban atau tanggung jawab yang telah diberikan oleh masing-masing organisasi atau lembaga.¹⁴

¹³ Hasan Mukmin, “Peranan Fakultas Dakwah Sebagai Lembaga Dakwah Kampus Dalam Pemberdayaan Masyarakat Islam Di Wilayah Lampung”, (Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014) Hal. 62

¹⁴ Syaron, dkk, “Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon”, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 04, No. 048, (2017), Hal. 2

Menurut Bruce J. Cohen, konsep "peran" dalam sosiologi merupakan suatu konstruksi sosial yang kompleks dan terdiri dari berbagai dimensi yang mencerminkan bagaimana individu menjalankan fungsi sosialnya di dalam struktur masyarakat. Cohen membagi peran ke dalam beberapa aspek yang menggambarkan dinamika antara individu dan ekspektasi sosial terhadap dirinya.¹⁵

- a. Pertama, terdapat apa yang disebut dengan peran nyata (*enacted role*), yaitu manifestasi aktual dari perilaku individu ketika ia menjalankan suatu peran sosial tertentu. Dalam konteks ini, peran dipahami sebagai tindakan yang benar-benar dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan posisi sosial yang ia tempati. Ini mencerminkan sejauh mana individu menerjemahkan ekspektasi sosial menjadi tindakan konkret.
- b. Kedua, peran yang dianjurkan (*prescribed role*) merujuk pada seperangkat norma dan harapan yang dibentuk oleh masyarakat terhadap individu dalam menjalankan suatu peran tertentu. Artinya, masyarakat memiliki standar atau patokan tertentu mengenai bagaimana seharusnya seseorang bertindak dalam suatu posisi atau status sosial. Misalnya, masyarakat memiliki harapan tertentu terhadap peran seorang guru, pemimpin, atau petugas layanan publik.
- c. Ketiga, Cohen mengemukakan konsep konflik peran (*role conflict*), yaitu suatu kondisi di mana individu menghadapi tekanan akibat adanya dua atau lebih peran yang dijalankannya secara bersamaan, namun peran-peran

¹⁵ Biddle, B. J. (2013). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors* (Revised ed.). Academic Press.

tersebut memiliki tuntutan atau tujuan yang saling bertentangan. Fenomena ini umum terjadi dalam masyarakat modern yang kompleks, di mana satu orang bisa memegang beberapa status sosial sekaligus, seperti seorang ibu yang juga merangkap sebagai pekerja profesional.

- d. Keempat, kesenjangan peran (*role distance*) mencerminkan ketidaksesuaian atau keterputusan secara emosional antara individu dan peran yang dijalankannya. Dalam kondisi ini, seseorang mungkin melaksanakan tugas-tugas yang diharapkan darinya, namun tidak terlibat secara emosional atau bahkan merasa tidak nyaman dengan peran tersebut. Hal ini bisa mencerminkan adanya tekanan psikologis atau ketidakpuasan terhadap peran sosial tertentu.
- e. Kelima, kegagalan peran (*role failure*) merupakan kondisi di mana individu tidak mampu memenuhi harapan sosial yang melekat pada peran yang ia emban. Kegagalan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kompetensi, tekanan lingkungan, atau hambatan struktural yang menghalangi seseorang dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sosialnya secara efektif.
- f. Keenam, Cohen juga menyebut tentang model peran (*role model*), yaitu individu lain yang perilakunya dianggap ideal atau patut diteladani. Dalam hal ini, seseorang menjadikan perilaku orang lain sebagai acuan atau pedoman dalam menjalankan peran sosialnya sendiri. Peran model ini sangat penting dalam proses sosialisasi, karena memberikan gambaran

konkret tentang bagaimana seharusnya suatu peran dijalankan secara optimal.

g. Ketujuh, konsep rangkaian peran (*role set*) merujuk pada keseluruhan hubungan sosial yang dimiliki seseorang ketika ia menjalankan suatu peran tertentu. Sebagai contoh, dalam peran sebagai guru, individu akan berinteraksi dengan murid, orang tua, rekan sejawat, dan kepala sekolah. Interaksi dengan berbagai pihak ini membentuk jaringan sosial yang kompleks yang turut memengaruhi bagaimana peran tersebut dijalankan.

h. Kedelapan, ketegangan peran (*role strain*) menggambarkan situasi ketika individu mengalami tekanan atau kesulitan dalam memenuhi tuntutan peran karena adanya ketidaksesuaian atau konflik internal di dalam peran itu sendiri. Tidak seperti konflik peran yang melibatkan dua atau lebih peran berbeda, ketegangan peran muncul dalam satu peran yang sama, misalnya ketika seorang dosen harus menyeimbangkan antara memberikan nilai objektif dengan menjaga hubungan baik dengan mahasiswa.

Secara keseluruhan, teori peran menurut Bruce J. Cohen menawarkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana individu berperilaku dalam konteks struktur sosial yang lebih luas, serta tantangan psikologis dan sosiologis yang menyertainya dalam upaya memenuhi ekspektasi sosial. Konsep ini sangat penting dalam menganalisis berbagai fenomena sosial, termasuk dinamika kerja, interaksi organisasi, dan relasi antarindividu dalam masyarakat.

2.1.2 Indikator Peran

Dalam kajian sosiologi dan administrasi publik, peran (*role*) merupakan suatu bentuk perilaku atau ekspektasi yang dilekatkan pada individu atau lembaga berdasarkan posisi atau status tertentu yang dimilikinya dalam suatu sistem sosial atau kelembagaan. Menurut Biddle (2013), peran meliputi harapan, identitas, dan tindakan yang dijalankan oleh aktor dalam memenuhi fungsi sosial atau organisasi yang telah ditetapkan.¹⁶

Untuk mengidentifikasi atau mengukur pelaksanaan peran dalam konteks organisasi atau lembaga, terdapat beberapa indikator utama yang secara umum digunakan dalam studi kebijakan dan kelembagaan, termasuk dalam sektor ketahanan pangan:

a. Kepatuhan terhadap Tugas

Indikator ini mengacu pada sejauh mana aktor menjalankan fungsi yang telah ditetapkan secara formal berdasarkan regulasi atau mandat kebijakan. Kepatuhan ini mencerminkan keselarasan antara instrumen hukum dengan implementasi di lapangan. Misalnya, Perum BULOG secara regulatif mendapat mandat dari PP No. 13 Tahun 2016 untuk mengelola cadangan pangan dan melakukan stabilisasi harga, sehingga pelaksanaannya dapat diukur dari konsistensi terhadap kebijakan tersebut.¹⁷

b. Efektivitas Pelaksanaan

¹⁶ Biddle, B. J. (2013). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors* (Revised ed.). Academic Press.

¹⁷ Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (PERUM) BULOG*.

Efektivitas menunjukkan sejauh mana pelaksanaan peran mencapai hasil yang diharapkan. Hal ini meliputi kemampuan untuk memenuhi target program, merespons krisis secara cepat, dan menyalurkan bantuan secara tepat sasaran. Siregar et al. (2023) menyatakan bahwa efektivitas dalam pengelolaan cadangan pangan sangat ditentukan oleh kecepatan intervensi dan kesiapan logistik di daerah-daerah rawan pangan.¹⁸

c. Koordinasi dan Sinergi

Peran aktor, khususnya institusi seperti BULOG, tidak dapat dijalankan secara sendiri. Maka, indikator koordinasi melibatkan sejauh mana aktor mampu membangun kerja sama lintas sektor, baik vertikal (pemerintah pusat–daerah) maupun horizontal (dengan masyarakat atau sektor swasta). Ramadhani & Fauziah (2022) menekankan bahwa keberhasilan distribusi pangan sangat ditentukan oleh sinergi antara BULOG, pemda, dan lembaga masyarakat lokal.¹⁹

d. Inovasi dan Adaptasi

Indikator ini berkaitan dengan kemampuan aktor dalam menyesuaikan strategi pelaksanaan peran dengan konteks dinamis, seperti krisis pangan atau perubahan iklim. Dalam hal ini, kemampuan menggunakan sistem logistik digital, integrasi data BMKG, dan

¹⁸ Siregar, F. R., Kurniawan, A. H., & Prasetyo, R. (2023). “Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Cadangan Pangan Pemerintah.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Krisnadwipayana*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.24843/JMBK.2023.v12.i01.p06>

¹⁹ Ramadhani, D., & Fauziah, N. (2022). “Ketahanan Pangan Lokal dalam Perspektif Krisis Iklim: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur.” *Jurnal Ketahanan Pangan*, 14(1), 45–59. <https://doi.org/10.21009/jkp.2022.14.1.4>

pemanfaatan gudang cadangan pangan menjadi bentuk konkret dari adaptasi kebijakan.²⁰

e. Keterlibatan Masyarakat

Pelaksanaan peran yang berkualitas tidak hanya dilihat dari sisi aktor utama, tetapi juga melibatkan partisipasi masyarakat sebagai penerima manfaat atau mitra. Dalam konteks ini, indikator keterlibatan mencakup aspek edukasi, pelibatan dalam musyawarah pangan, hingga partisipasi dalam program distribusi pangan seperti lumbung pangan masyarakat (LPM). Yusra & Hidayati (2021) menyoroti pentingnya partisipasi komunitas lokal dalam mendukung ketahanan pangan berbasis wilayah pesisir.²¹

f. Akuntabilitas dan Transparansi

Aktor yang menjalankan peran publik juga perlu menunjukkan akuntabilitas melalui pelaporan yang terbuka dan sistem evaluasi berbasis kinerja. Hal ini meliputi transparansi anggaran, capaian distribusi, dan pengelolaan stok pangan. FAO (2023) merekomendasikan bahwa sistem pangan nasional harus dilengkapi dengan instrumen pengawasan berbasis data terbuka untuk memastikan akuntabilitas terhadap publik.²²

²⁰ Utomo, B. (2020). "Tantangan dan Peran BULOG di Era Industri 4.0." *Jurnal Pangan Indonesia*, 9(2), 101–110.

²¹ Yusra, L., & Hidayati, M. (2021). "Analisis Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas di Daerah Pesisir." *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.24198/jsep.v9i2.2021>

²² FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>

2.1.3 Konsep Perum BULOG

A. Pengertian BULOG

Perum BULOG (Badan Urusan Logistik) merupakan sebuah perusahaan umum milik negara (BUMN) yang memiliki mandat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai aktivitas logistik dan distribusi pangan. Peran utama BULOG tidak hanya terbatas pada fungsi komersial, tetapi juga meliputi pelaksanaan tugas-tugas publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat luas, khususnya dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas harga bahan pangan pokok.

Secara struktural dan fungsional, ruang lingkup kegiatan usaha Perum BULOG mencakup sejumlah sektor penting dalam sistem logistik pangan nasional. Di antaranya adalah usaha pergudangan dan distribusi logistik, jasa survei dan pengendalian hama pangan, penyediaan karung plastik sebagai bagian dari sistem kemasan pangan, layanan transportasi dan angkutan barang, perdagangan berbagai komoditas pangan strategis seperti beras, gula, dan jagung, serta pengembangan sektor ritel sebagai upaya mendekatkan layanan kepada konsumen akhir.

Sebagai entitas bisnis yang sekaligus menjalankan misi pelayanan publik, BULOG tetap melaksanakan berbagai program intervensi pemerintah dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan pangan. Tugas-tugas tersebut antara lain mencakup pelaksanaan kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dan beras, stabilisasi harga

pangan pokok di tingkat konsumen melalui kegiatan Operasi Pasar, penyaluran beras cadangan pemerintah untuk kelompok masyarakat rentan, serta pengelolaan stok pangan nasional guna mengantisipasi gejolak harga dan gangguan pasokan akibat bencana atau krisis lainnya.

Peran ganda BULOG sebagai pelaku usaha dan penyelenggara fungsi stabilisasi sosial-ekonomi menjadikannya sebagai salah satu institusi kunci dalam sistem ketahanan pangan nasional. Dalam menghadapi tantangan seperti fluktuasi harga global, perubahan iklim, dan gangguan distribusi, BULOG dituntut untuk terus berinovasi dalam meningkatkan efisiensi logistik, transparansi tata kelola, serta memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait.

B. Visi dan Misi Perum BULOG

Sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan peran strategis dalam sektor pangan, Perum BULOG memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman utama dalam setiap aktivitas kelembagaan dan operasionalnya. Visi dan misi ini mencerminkan komitmen BULOG dalam mendukung kedaulatan pangan nasional dan memperkuat sistem logistik pangan yang tangguh dan inklusif.

1. Visi

“Menjadi perusahaan yang unggul dalam mewujudkan kedaulatan pangan.” Visi ini menggambarkan arah jangka panjang Perum BULOG sebagai institusi logistik pangan yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi usaha, tetapi juga memiliki kontribusi besar

terhadap pencapaian kedaulatan pangan nasional. Unggul dalam konteks ini mencakup keunggulan dalam pengelolaan cadangan pangan, distribusi yang adil dan merata, serta kemampuan responsif terhadap krisis pangan. Kedaulatan pangan sendiri dimaknai sebagai kondisi di mana negara memiliki kendali penuh terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi pangan yang sehat dan terjangkau bagi seluruh rakyat.

2. Misi

Untuk merealisasikan visinya, Perum BULOG menetapkan sejumlah misi utama yang menjadi landasan operasional sekaligus arah strategis perusahaan. Adapun misi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya untuk memenuhi kebutuhan pangan pokok.

Perum BULOG menempatkan pelayanan publik sebagai prioritas utama, khususnya dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan strategis seperti beras, gula, dan minyak goreng. Pelayanan prima ini diwujudkan melalui mekanisme distribusi yang adil, intervensi harga di pasar, serta koordinasi yang erat dengan pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah.

- b. Mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Sebagai entitas bisnis, BULOG juga berkomitmen untuk terus tumbuh secara berkelanjutan melalui pengembangan

portofolio usaha yang mendukung stabilitas pangan, inovasi dalam logistik, serta efisiensi manajerial. Pertumbuhan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, tetapi juga memperluas manfaat sosial dan ekonomi bagi masyarakat.

- c. Mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

Untuk mencapai integritas dan akuntabilitas yang tinggi, BULOG menegaskan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan keadilan. Praktik tata kelola yang baik ini menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik serta keberlanjutan peran BULOG sebagai mitra utama pemerintah dalam sektor pangan.

C. Program Raskin

Program Raskin sangat strategi dan menjadi program nasional yang dikelola secara lintas sektoral baik vertikal maupun horizontal. Seluruh Kementerian / Lembaga terkait, baik pusat maupun di daerah mengambil bagian tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program Raskin, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Pemerintah pusat berperan dalam membuat kebijakan program, sedangkan pelaksanaannya sangat tergantung kepada pemerintah daerah. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah sangat penting dalam peningkatan efektivitas program Raskin.

Adapun manfaat dari program Raskin adalah sebagai berikut:

1. Stabilisasi harga beras di pasaran.
2. Pengendalian inflasi dan menjaga stok pangan nasional.
3. Peningkatan ketahanan pangan sekaligus mekanisme perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan.
4. Peningkatan akses pangan baik secara fisik maupun ekonomi.
5. Sebagai pasar bagi hasil usaha tani padi.
6. Membantu pertumbuhan ekonomi daerah.

D. Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan konsep strategis yang menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional, khususnya dalam menjamin hak dasar setiap warga negara untuk memperoleh pangan yang cukup, bergizi, aman, dan layak. Dalam konteks kebijakan nasional Indonesia, ketahanan pangan didefinisikan sebagai suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi negara hingga tingkat individu, yang tercermin dari tersedianya pangan dalam jumlah yang mencukupi, kualitas yang baik (aman, bergizi, dan beragam), serta distribusi yang merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.²³

Selain itu, prinsip ketahanan pangan juga harus sejalan dengan nilai-nilai lokal, agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, guna mendukung kehidupan yang sehat, aktif, dan produktif secara

²³ Perum Bulog Nasional, <http://180.250.19.213/ketahananpangan.php>, Diakses Pada 30 November 2022.

berkelanjutan (Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi).

Sebagai institusi yang diberi mandat untuk membantu negara dalam menjaga stabilitas pangan, Perum BULOG menjadikan prinsip ketahanan pangan sebagai landasan utama dalam merancang dan melaksanakan program-programnya. Untuk mendukung peran tersebut, Perum BULOG mengacu pada tiga pilar utama ketahanan pangan yang telah diakui secara nasional maupun internasional, yakni:

1. Pilar I: Ketersediaan (*Availability*)

Pilar ini mengacu pada kondisi di mana pangan tersedia dalam jumlah yang cukup di tingkat nasional maupun lokal. Ketersediaan ini dapat berasal dari hasil produksi dalam negeri, cadangan pemerintah, atau impor jika diperlukan. BULOG memiliki tanggung jawab utama dalam memastikan bahwa pangan strategis seperti beras selalu tersedia melalui pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), penyimpanan stok di gudang-gudang logistik, serta perencanaan penyaluran secara berkala. Keberhasilan dalam aspek ini menjadi penopang utama dalam mencegah krisis pangan, terutama di daerah yang rentan.

2. Pilar II: Keterjangkauan Fisik dan Ekonomi (*Accessibility*)

Keterjangkauan berarti bahwa masyarakat memiliki akses terhadap pangan, baik secara fisik (tersedia di wilayah tempat tinggal) maupun secara ekonomi (dapat dibeli dengan harga terjangkau). BULOG melalui program seperti Operasi Pasar (OP) dan penyaluran

Beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) berperan dalam memastikan harga pangan pokok tetap dalam jangkauan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan dan miskin. Aksesibilitas ini juga erat kaitannya dengan fungsi distribusi pangan ke daerah terpencil dan rawan pangan yang menjadi salah satu fokus utama BULOG.

3. Pilar III: Stabilitas Pasokan dan Harga (*Stability*)

Stabilitas menyangkut kesinambungan ketersediaan pangan sepanjang waktu dan stabilitas harga di pasar. Fluktuasi harga yang tajam dapat mengancam ketahanan pangan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Untuk itu, BULOG melakukan intervensi pasar secara rutin, terutama ketika terjadi inflasi pangan atau gangguan pada rantai pasok akibat bencana, cuaca ekstrem, atau gangguan produksi. Strategi stabilisasi ini menjadi semakin penting dalam menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan volatilitas harga global.

2.1.4 Konsep Pangan

Pangan adalah kebutuhan yang paling mendasar bagi kehidupan manusia. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 Pangan adalah segala sesuatu mulai dari mata air alamai pertanian, peternakan, hutan, perikanan, termasuk bahan tambahan pangan, bahan mentah pangan, dan lain-lain. Bahan yang digunakan dalam perencanaan, ersiapan, dan produksi makanan atau minuman. Menurut FAO pangan adalah sesuatu yang dikonsumsi secara konsisten dalam jumlah tertentu dan berubah menjadi bagian umum dari rutinitas makan

yang berlebihan sebagaimana menjadi sumber utama energi dan gizi yang dibutuhkan tubuh. Mana pangan adalah bahan yang dimakan hari demi hari dalam memenuhi kebutuhan untuk perkembangan, substitusi jaringan, pekerjaan, penunjang, dan pengaturan tindakan dalam tubuh.²⁴

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pangan adalah sesuatu yang mendasar di konsumsi oleh manusia ataupun bahan-bahan secara berkelanjutan dengan jumlah tertentu yang akan digunakan untuk memproduksi makanan ataupun minuman yang berasal dari sumber hayati agar terpenuhinya kebutuhan bagi tubuh manusia.

2.1.5 Indikator Krisis Pangan

Krisis pangan merupakan suatu kondisi darurat yang terjadi ketika sistem pangan mengalami gangguan serius yang menyebabkan ketidakmampuan masyarakat, baik secara individu maupun kolektif, untuk memperoleh akses terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan layak secara ekonomi. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan kelangkaan komoditas pangan, tetapi juga menjadi indikator struktural terhadap lemahnya sistem ketahanan pangan nasional maupun lokal. Krisis pangan dapat dipicu oleh berbagai faktor, seperti kegagalan panen, konflik sosial, bencana alam, perubahan iklim, atau gangguan distribusi logistik. Dampaknya sangat kompleks, mulai dari menurunnya kualitas gizi, meningkatnya angka kemiskinan, hingga terancamnya stabilitas sosial dan politik suatu wilayah.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, penyelenggaraan ketahanan pangan nasional

²⁴ Qoriah, Miftahul, Thesis: “Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan”, (Kalimantan, Institut Teknologi Kalimantan, 2021), Hal. 13

harus mencakup dimensi ketersediaan, aksesibilitas, pemanfaatan, dan stabilitas pangan. Dalam konteks ini, krisis pangan dapat diidentifikasi melalui tiga indikator utama, yaitu:

a. Cadangan Pangan

Cadangan pangan merupakan indikator fundamental dalam mengukur kesiapan suatu negara atau daerah dalam menghadapi kemungkinan gangguan pasokan pangan. Cadangan ini biasanya terdiri dari komoditas pokok seperti beras, jagung, dan kedelai yang disimpan dalam gudang-gudang strategis milik pemerintah, seperti yang dikelola oleh Perum BULOG. Peran BULOG dalam pengelolaan cadangan pangan sangat krusial, tidak hanya sebagai penyangga harga di pasar tetapi juga sebagai alat intervensi darurat pada saat terjadi kelangkaan. Ketersediaan cadangan pangan dalam jumlah dan mutu yang memadai merupakan bentuk nyata dari langkah preventif pemerintah untuk menjamin hak dasar masyarakat terhadap pangan dalam keadaan krisis. Selain itu, rotasi dan pengawasan mutu terhadap cadangan tersebut juga menjadi bagian integral dari upaya menjaga keamanan dan efisiensi penggunaan pangan cadangan.²⁵

b. Distribusi Pangan

Distribusi pangan merujuk pada mekanisme penyebaran bahan pangan dari titik produksi atau gudang penyimpanan menuju wilayah konsumsi. Dalam kondisi normal, distribusi ini dijalankan melalui jaringan

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

pasar yang efisien. Namun, dalam situasi krisis, distribusi pangan menjadi komponen kunci yang menentukan kecepatan pemulihan dan keberlanjutan akses pangan masyarakat terdampak. Distribusi pangan yang responsif memerlukan dukungan infrastruktur logistik yang baik, koordinasi antar lembaga, dan peta kerawanan pangan yang akurat. Wilayah-wilayah yang terpencil, seperti daerah pedalaman atau kepulauan, sering kali menjadi wilayah paling rentan karena minimnya akses transportasi dan informasi. Oleh karena itu, penguatan sistem distribusi pangan berbasis risiko menjadi strategi penting dalam mengantisipasi eskalasi krisis.²⁶

c. Stabilisasi Pangan

Stabilisasi pangan merupakan upaya sistematis dari pemerintah untuk menjaga agar harga dan ketersediaan pangan tetap berada dalam kondisi yang wajar dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan. Instrumen utama dalam stabilisasi ini adalah operasi pasar, penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), serta pengawasan terhadap praktik spekulatif atau penimbunan. Dalam konteks ketahanan pangan, stabilisasi berfungsi sebagai peredam gejolak pasar akibat fluktuasi harga, perubahan musim, atau dinamika pasar global. Stabilisasi pangan juga sangat terkait dengan stabilitas sosial dan politik, karena lonjakan harga pangan terbukti secara historis menjadi pemicu keresahan sosial di berbagai negara berkembang. Oleh sebab itu,

²⁶ Siregar, F. R., Kurniawan, A. H., & Prasetyo, R. (2023). *Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Cadangan Pangan Pemerintah*. Jurnal Manajemen dan Bisnis Krisnadwipayana, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.24843/JMBK.2023.v12.i01.p06>

stabilisasi bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi juga strategi politik dan kemanusiaan.²⁷

Dengan mempertimbangkan ketiga indikator tersebut, maka penanggulangan krisis pangan harus dipahami sebagai upaya multidimensi yang menuntut koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, keterlibatan lembaga logistik pangan seperti Perum BULOG, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan berbasis lokal.

2.1.6 Penanggulangan Krisis Pangan

Krisis pangan merupakan fenomena kompleks yang terjadi ketika sistem produksi, distribusi, dan konsumsi pangan mengalami gangguan serius, sehingga menyebabkan penurunan ketersediaan pangan dan meningkatnya jumlah penduduk yang gagal memenuhi kebutuhan gizi dasar. Fenomena ini sering kali dipicu oleh kombinasi faktor struktural, termasuk perubahan iklim, bencana alam, disrupsi rantai pasok global, dan ketidakcukupan infrastruktur lokal. Di Indonesia, situasi ini diperparah oleh disparitas akses antar wilayah, terutama di daerah terpencil dan geografis lemah.²⁸

Secara regulatif, penanggulangan krisis pangan menjadi bagian dari strategi ketahanan pangan nasional yang diamanatkan melalui Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan dan diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 yang menguraikan empat pilar ketahanan pangan: ketersediaan (*availability*), aksesibilitas (*accessibility*), pemanfaatan (*utilization*),

²⁷ WFP (2022). *Shock-Responsive Safety Nets for Food Crisis Mitigation*. <https://www.wfp.org/publications/shock-responsive-social-protection>

²⁸ FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>

dan stabilitas (*stability*). Teori ini mendasari mandat lembaga negara seperti Perum BULOG, yang ditugasi untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta menjalankan intervensi pasar untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan.²⁹

A. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Logistik Responsif

Cadangan pangan pemerintah merupakan elemen krusial dalam sistem ketahanan pangan nasional yang berfungsi sebagai instrumen tanggap darurat, khususnya dalam menghadapi krisis yang berkaitan dengan ketersediaan dan aksesibilitas pangan. Dalam konteks ini, Perum BULOG memegang peranan penting tidak hanya sebagai penyedia dan pengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP), tetapi juga sebagai aktor kunci dalam pengelolaan logistik pangan nasional. BULOG tidak sekadar berfungsi sebagai tempat penyimpanan beras, tetapi telah berkembang menjadi pengelola rantai pasok pangan strategis termasuk proses distribusi darurat dari gudang induk ke gudang pembantu di wilayah-wilayah rentan krisis seperti Kabupaten Aceh Tengah.³⁰

Proses pengelolaan logistik ini mencakup beberapa langkah penting. Pertama, rotasi dan pemantauan kualitas stok dilakukan secara berkala guna mencegah kerusakan fisik dan penurunan mutu akibat penyimpanan yang terlalu lama. Rotasi ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa beras yang disalurkan ke masyarakat tetap memenuhi

²⁹ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015

³⁰ Pusat Data dan Informasi Perum BULOG. (2023). *Laporan Operasional BULOG Wilayah Aceh Tengah*. Takengon: Perum BULOG.

standar kualitas konsumsi. Kedua, BULOG melakukan diversifikasi lokasi penyimpanan yakni dengan membangun atau bekerja sama dalam penggunaan gudang pembantu di titik-titik strategis yang mendekati daerah-daerah dengan indeks kerawanan pangan tinggi. Diversifikasi ini menjadi strategi mitigasi untuk mengatasi gangguan logistik akibat bencana alam seperti banjir dan longsor, yang kerap melanda kawasan perbukitan dan pegunungan di Aceh Tengah.³¹

Ketiga, terdapat koordinasi erat dengan pemerintah daerah (Pemda) dalam menentukan titik distribusi prioritas. Pemda menyediakan data lapangan terkait populasi terdampak, hasil panen lokal, dan tingkat kerentanan gizi masyarakat. Data ini menjadi dasar dalam pengambilan keputusan tentang kapan dan di mana cadangan pangan harus segera disalurkan. Hal ini selaras dengan pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*), yang menekankan pentingnya integrasi data spasial dan temporal dalam proses penanggulangan krisis pangan.³²

Menurut penelitian Siregar et al. (2023), efektivitas sistem cadangan pangan nasional sangat ditentukan oleh kecepatan intervensi logistik serta kapasitas teknologi informasi yang digunakan dalam pengelolaan rantai pasok. Dalam konteks distribusi darurat, sistem informasi yang adaptif terhadap kondisi medan geografis dan perubahan iklim akan mempercepat pengambilan keputusan serta mengurangi waktu

³¹ Dianti, A. R., & Sari, A. D. (2024). "Analisis Strategi Logistik Pengadaan Beras dalam Menunjang Ketahanan Pangan di GBB Klaten." *Jurnal Logistik Bisnis*, 14(1), 112–124. <https://doi.org/10.46369/logistik.v14i1.3624>

³² Badan Pangan Nasional & World Food Programme. (2022). *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Jakarta: Bapanas & WFP.

respon dari pemerintah pusat dan BULOG. Studi tersebut juga menekankan perlunya sistem monitoring berbasis digital yang dapat mengintegrasikan informasi stok, cuaca, dan kebutuhan pangan dalam satu dashboard logistik nasional.³³

Hal ini menunjukkan bahwa BULOG secara institusional telah bergerak ke arah penguatan ketahanan pangan berbasis adaptasi, sesuai dengan kerangka kerja yang direkomendasikan oleh FAO (2023) dan *World Food Programme* (2022) dalam *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), yang menyebutkan bahwa kelembagaan pangan perlu mengembangkan *shock-responsive safety nets* dan *adaptive logistics planning* sebagai bagian dari strategi jangka panjang.³⁴

B. Operasi Pasar sebagai Mekanisme Stabilitas Harga

Operasi Pasar (OP) merupakan instrumen vital dalam kebijakan stabilisasi harga pangan yang dijalankan oleh Perum BULOG, khususnya di wilayah yang mengalami lonjakan harga akibat kelangkaan pasokan atau gangguan distribusi. Dalam konteks Kabupaten Aceh Tengah, kegiatan Operasi Pasar menjadi semakin krusial mengingat tingginya volatilitas harga pangan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula yang dipicu oleh kondisi geografis, musim tanam yang tidak menentu, serta keterbatasan produksi lokal.

³³ Siregar, F. R., Kurniawan, A. H., & Prasetyo, R. (2023). "Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Cadangan Pangan Pemerintah." *Jurnal Manajemen dan Bisnis Krisnadwipayana*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.24843/JMBK.2023.v12.i01.p06>

³⁴ WFP. (2022). *Shock-Responsive Safety Nets for Food Crisis Mitigation*. <https://www.wfp.org/publications/shock-responsive-social-protection>

Intervensi ini dirancang sebagai respons terhadap gejolak pasar yang berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan seperti buruh tani, nelayan, dan petani kecil. BULOG, bekerja sama dengan pemerintah daerah (Pemda), menetapkan titik distribusi strategis di kecamatan-kecamatan rawan inflasi, seperti Kecamatan Bebesen, Silih Nara, dan Rusip Antara. Komoditas yang dijual dalam OP disalurkan dengan harga di bawah pasar umum, mendekati atau sedikit di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh pemerintah. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk:

1. Menekan inflasi pangan di pasar lokal yang kerap terjadi menjelang hari besar keagamaan atau musim paceklik;
2. Menjaga keterjangkauan harga, khususnya bagi masyarakat miskin dan rentan;
3. Mencegah praktik spekulasi harga dan panic buying, yang dapat memperburuk ketimpangan pasokan dan harga di pasar.³⁵

Studi *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) 2022* yang diterbitkan oleh Badan Pangan Nasional dan *World Food Programme* menyatakan bahwa pelaksanaan OP di daerah-daerah rentan seperti Aceh Tengah dapat menurunkan “premi harga” di pasar tradisional hingga 15–20% dalam waktu kurang dari 10 hari masa intervensi.³⁶ Penurunan ini berimplikasi positif terhadap tingkat konsumsi kalori rumah tangga,

³⁵ Siregar, F. R., Kurniawan, A. H., & Prasetyo, R. (2023). “Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Cadangan Pangan Pemerintah.” *Jurnal Manajemen dan Bisnis Krisnadwipayana*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.24843/JMBK.2023.v12.i01.p06>

³⁶ Badan Pangan Nasional & World Food Programme. (2022). *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Jakarta: Bapanas & WFP.

terutama di wilayah dengan tingkat kemiskinan struktural yang tinggi, yakni lebih dari 20% berdasarkan data BPS Aceh Tengah (2023).³⁷

Lebih lanjut, intervensi harga melalui OP juga berkaitan erat dengan fungsi perlindungan konsumen dari praktik penimbunan dan spekulasi pasar. Menurut Utomo (2020), intervensi yang dilakukan secara tepat waktu oleh lembaga seperti BULOG berperan dalam menciptakan *psychological market effect*, di mana ekspektasi masyarakat dan pedagang terhadap harga menjadi lebih stabil dan terkendali.³⁸

Namun demikian, efektivitas OP sangat tergantung pada tiga hal utama: (1) ketepatan waktu pelaksanaan, (2) akurasi data daerah rawan inflasi, dan (3) keandalan logistik distribusi. Untuk menjawab tantangan tersebut, BULOG mengembangkan sistem informasi pasar harian dan memperkuat koordinasi dengan pihak desa dalam menentukan lokasi OP yang paling berdampak. Ini merupakan bagian dari adaptasi kelembagaan terhadap dinamika lokal dan bentuk konkret implementasi strategi ketahanan pangan yang inklusif dan responsif.

2.1.7 Indikator Faktor Penghambat

Dalam konteks pembangunan ketahanan pangan, faktor penghambat mengacu pada berbagai kendala baik struktural, teknis, maupun ekologis yang memengaruhi efektivitas kebijakan dan program penanggulangan krisis pangan. Ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada seberapa besar cadangan pangan

³⁷ BPS Kabupaten Aceh Tengah. (2023). *Kabupaten Aceh Tengah dalam Angka 2023*. Takengon: BPS.

³⁸ Utomo, B. (2020). "Tantangan dan Peran BULOG di Era Industri 4.0." *Jurnal Pangan Indonesia*, 9(2), 101–110.

dimiliki atau seefisien apa distribusinya, tetapi juga pada kemampuan sumber daya pendukung dalam mempertahankan sistem pangan yang tangguh. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi menyebutkan bahwa keberhasilan ketahanan pangan sangat ditentukan oleh integrasi antara kualitas sumber daya, kemampuan adaptasi, dan kebijakan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, terdapat tiga indikator utama faktor penghambat krisis pangan, yaitu:

a. Sumber Daya Manusia (SDM)

SDM menjadi faktor kunci dalam pengelolaan sistem pangan, mulai dari tahap produksi, pascapanen, distribusi hingga konsumsi. Namun, di banyak daerah, masih ditemukan rendahnya kapasitas tenaga kerja di sektor pertanian dan distribusi pangan, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Rendahnya tingkat pendidikan petani, minimnya pelatihan teknologi pertanian modern, serta keterbatasan akses terhadap informasi pertanian terkini menjadi penghalang signifikan dalam mencapai efisiensi produksi dan distribusi pangan.

Menurut Siregar et al. (2023), daerah dengan tingkat pendidikan rendah memiliki produktivitas lahan yang lebih rendah, serta rentan terhadap ketergantungan pada bantuan pangan pemerintah.³⁹ Hal ini semakin diperparah oleh urbanisasi tenaga kerja muda yang menyebabkan sektor pertanian kekurangan tenaga kerja potensial yang produktif.

b. Sumber Daya Alam (SDA)

³⁹ Siregar, F. R., Kurniawan, A. H., & Prasetyo, R. (2023). *Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Cadangan Pangan Pemerintah*. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Krisnadwipayana*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.24843/JMBK.2023.v12.i01.p06>

Ketersediaan dan kualitas sumber daya alam merupakan fondasi utama bagi keberlanjutan sistem pangan. Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah degradasi lahan pertanian, penurunan kualitas tanah, alih fungsi lahan produktif untuk kepentingan industri atau perumahan, serta terbatasnya akses terhadap air irigasi. Beberapa wilayah yang rentan krisis pangan seperti Aceh Tengah menunjukkan kondisi di mana lahan sempit dan curam, serta irigasi yang terbatas, menghambat produksi pangan lokal.⁴⁰

Selain itu, konflik agraria dan kepemilikan lahan yang tidak jelas memperparah kesulitan masyarakat dalam mengelola sumber daya alamnya secara optimal. Potensi pangan lokal pun sering kali belum tergarap secara maksimal akibat rendahnya eksplorasi biodiversitas pangan.

c. Iklim

Faktor iklim, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim global, menjadi salah satu ancaman terbesar terhadap ketahanan pangan. Anomali cuaca seperti curah hujan yang tidak menentu, peningkatan suhu rata-rata tahunan, kekeringan ekstrem, dan bencana hidrometeorologi seperti banjir atau tanah longsor berdampak langsung terhadap produksi pangan, terutama tanaman pangan pokok.

Berdasarkan laporan FAO (2023), dampak perubahan iklim secara global diperkirakan akan menurunkan produktivitas pertanian hingga 30%

⁴⁰ Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah. (2023). *Laporan Pemetaan Wilayah Rentan Pangan Kabupaten Aceh Tengah*. Takengon: Pemerintah Daerah Aceh Tengah.

di wilayah-wilayah tropis bila tidak dilakukan adaptasi berbasis teknologi dan manajemen risiko.⁴¹ Kondisi ini menuntut adanya sistem pertanian adaptif seperti penggunaan varietas tahan iklim ekstrem, integrasi data cuaca dalam perencanaan tanam, dan pengembangan teknologi pertanian presisi.

Faktor penghambat krisis pangan di atas menunjukkan bahwa penanggulangan krisis pangan tidak dapat hanya bergantung pada intervensi kebijakan jangka pendek. Diperlukan pembangunan kapasitas manusia secara berkelanjutan, perlindungan lingkungan dan tata guna lahan yang bijak, serta kesiapan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tanpa memperhatikan dimensi struktural ini, program ketahanan pangan akan cenderung reaktif, bukan preventif, dan tidak menyelesaikan akar persoalan kerentanan pangan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Berikut adalah beberapa kajian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang peneliti teliti.

Penelitian oleh Qoriah Miftahul (2021)⁴² berfokus pada strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga nelayan di Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan. Tujuan utama studi ini adalah merumuskan strategi yang kontekstual dan tepat sasaran untuk meningkatkan kapasitas ketahanan pangan pada kelompok masyarakat pesisir

⁴¹ FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>

⁴² Miftahul, Q. (2021). *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan*. Balikpapan: Institut Teknologi Kalimantan.

yang rentan terhadap fluktuasi pasokan dan akses pangan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan teknik analisis regresi logistik ordinal, ditemukan bahwa sebagian besar rumah tangga nelayan masuk dalam kategori kurang tahan pangan, dengan hanya empat rumah tangga tergolong tahan pangan. Faktor determinan utama adalah jumlah anggota keluarga dan pengeluaran rumah tangga. Selain itu, analisis SWOT yang dilakukan menghasilkan 26 strategi peningkatan ketahanan pangan yang dapat digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan lokal. Temuan ini menegaskan perlunya strategi intervensi yang terintegrasi antara aspek ekonomi rumah tangga dan dukungan kelembagaan daerah.

Sementara itu, Nobila Saumy Arghniya (2022)⁴³ meneliti peran pemerintah daerah dalam mengatasi kerawanan pangan masyarakat di Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, dengan merujuk pada implementasi Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten. Penelitian ini menyoroti bahwa pemerintah daerah telah menginisiasi berbagai program seperti pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) serta pengadaan bantuan gabah untuk menjaga ketersediaan pangan di wilayah tersebut. Namun, efektivitas kebijakan ini masih terbatas, ditandai dengan adanya gampong yang belum menunjukkan perbaikan signifikan dalam hal ketersediaan pangan. Salah satu faktor penghambat yang diidentifikasi adalah rendahnya intensitas produksi padi, yang hanya dilakukan satu kali dalam setahun, sehingga berdampak pada ketidakberlanjutan pasokan pangan. Kajian ini

⁴³ Arghniya, N. S. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

mempertegas pentingnya sinkronisasi antara kapasitas produksi pertanian lokal dan mekanisme cadangan pangan daerah.

Studi yang dilakukan oleh Michael Lega (2023)⁴⁴ merupakan kajian kualitatif deskriptif mengenai pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan oleh Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan, Dinas Pertanian Kabupaten Sleman. Hasil studi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih dihadapkan pada berbagai kendala struktural dan teknis, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, alokasi dana yang belum memadai, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Kondisi ini mengakibatkan rendahnya tingkat realisasi program-program yang seharusnya masuk dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) sektor ketahanan pangan. Temuan ini mengindikasikan perlunya reformasi kelembagaan dan peningkatan kapasitas birokrasi lokal untuk mencapai efektivitas pelaksanaan kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif.

Prasetyo dan Santosa (2020)⁴⁵ mengevaluasi peran strategis Perum BULOG dalam menjaga stabilitas harga pangan pokok, khususnya selama krisis pandemi COVID-19. Penelitian ini mengkaji efektivitas kebijakan operasi pasar dan intervensi stok pangan dalam meredam gejolak harga, serta menilai ketepatan strategi distribusi pangan pada masa darurat. Hasil studi menunjukkan bahwa BULOG mampu menjaga stabilitas harga beras dan bahan pokok lainnya, meskipun distribusi terganggu oleh tantangan logistik akibat pembatasan

⁴⁴ Lega, M. (2023). *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman (Studi Penelitian di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

⁴⁵ Prasetyo, R. A., & Santosa, A. (2020). *Evaluasi Peran BULOG dalam Menstabilkan Harga Pangan Pokok di Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 7(2), 101–115.

mobilitas dan lonjakan permintaan. Penelitian ini menekankan pentingnya fleksibilitas operasional dan integrasi antara program pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung ketahanan pangan nasional pada masa krisis multidimensi.

Ramadhani dan Fauziah (2022)⁴⁶ mengkaji ketahanan pangan lokal di Kabupaten Lombok Timur dari perspektif krisis iklim yang semakin nyata. Melalui studi kasus di wilayah yang rawan terhadap perubahan iklim, peneliti mengidentifikasi bahwa pola cuaca yang tidak menentu telah menyebabkan penurunan hasil panen dan meningkatnya risiko kerawanan pangan. Penelitian ini menekankan pentingnya strategi adaptasi berbasis lokal, seperti diversifikasi tanaman pangan, peningkatan akses air, serta penguatan kelembagaan petani. Hasil penelitian ini selaras dengan literatur global yang menyarankan pendekatan sistemik dan multisektor dalam menangani dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan.

Selanjutnya, penelitian Susanti dan Rahmat (2023)⁴⁷ menyoroti peran penting pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah yang rawan krisis, baik karena faktor geografis, ekonomi, maupun sosial. Studi ini menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah meliputi pengelolaan cadangan pangan daerah, pemberian subsidi logistik, serta kerjasama dengan Perum BULOG dan komunitas petani lokal. Keberhasilan program-program tersebut bergantung pada koordinasi lintas sektor, penguatan sistem distribusi, serta responsivitas terhadap data kerawanan pangan yang akurat dan terkini.

⁴⁶ Ramadhani, D., & Fauziah, N. (2022). *Ketahanan Pangan Lokal dalam Perspektif Krisis Iklim: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur*. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 14(1), 45–59.

⁴⁷ Susanti, H., & Rahmat, A. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilitas Pangan di Wilayah Rawan Krisis*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(3), 88–102.

Terakhir, kajian oleh Yusra dan Hidayati (2021)⁴⁸ mengangkat pentingnya strategi ketahanan pangan berbasis komunitas di daerah pesisir. Studi ini menegaskan bahwa penguatan lembaga lokal, pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan pertanian ramah lingkungan, serta peningkatan akses pasar bagi hasil pertanian merupakan komponen utama dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan dan berbasis lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas memiliki potensi besar dalam meningkatkan kemandirian pangan di wilayah dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana dan perubahan lingkungan.

Secara umum, seluruh kajian terdahulu tersebut memberikan gambaran menyeluruh bahwa keberhasilan sistem ketahanan pangan, baik di tingkat lokal maupun nasional, sangat ditentukan oleh sinergi antarlembaga, dukungan kebijakan yang responsif, serta pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan dan implementasi program. Temuan-temuan ini memberikan kontribusi penting dalam menyusun strategi ketahanan pangan yang tidak hanya teknokratik, tetapi juga inklusif dan adaptif terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan ekologis.

A R - R A N I R Y

Tabel 2.1 Kajian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1	Qoriah Miftahul, Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan	Merumuskan strategi peningkatan ketahanan pangan pada rumah tangga nelayan di Kelurahan Manggar Baru, Balikpapan Timur.	Ditemukan bahwa sebagian besar rumah tangga nelayan berada dalam kategori kurang tahan pangan. Faktor yang memengaruhi meliputi jumlah anggota keluarga dan pengeluaran rumah tangga. Analisis SWOT menghasilkan 26 strategi peningkatan

⁴⁸ Yusra, L., & Hidayati, M. (2021). *Analisis Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas di Daerah Pesisir*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(2), 121–135.

	Timur Kota Balikpapan, 2021 ⁴⁹		ketahanan pangan yang dapat diterapkan secara kontekstual.
2	Nobila Saumy Arghniya, Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar, 2022 ⁵⁰	Mengetahui efektivitas kebijakan daerah dalam mengatasi kerawanan pangan melalui pengelolaan cadangan pangan pemerintah.	Pemerintah daerah membentuk Lumbung Pangan Masyarakat dan menyediakan bantuan gabah, tetapi dampaknya belum signifikan di beberapa gampong. Keterbatasan produksi padi yang hanya sekali setahun menghambat ketersediaan pangan secara berkelanjutan.
3	Michael Lega, Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman, 2013 ⁵¹	Menggambarkan realita pelaksanaan kebijakan ketahanan pangan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Sleman.	Implementasi kebijakan masih menghadapi kendala, khususnya keterbatasan SDM dan dana, yang menyebabkan banyak program dalam Standar Pelayanan Minimal (SPM) belum dapat direalisasikan secara optimal.
4	Prasetyo, R. A., & Santosa, A. (2020). Evaluasi Peran BULOG dalam Menstabilkan Harga Pangan Pokok di Masa Pandemi COVID-19. ⁵²	Mengevaluasi efektivitas peran BULOG dalam menjaga stabilitas harga pangan selama krisis pandemi.	BULOG dinilai cukup efektif dalam mengendalikan harga beras dan bahan pangan pokok melalui operasi pasar dan intervensi stok, meskipun menghadapi tantangan distribusi dan lonjakan permintaan.
5	Ramadhani, D., & Fauziah, N. (2022). Ketahanan Pangan Lokal dalam Perspektif Krisis Iklim: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur. ⁵³	Mengkaji dampak krisis iklim terhadap ketahanan pangan lokal di Lombok Timur.	Perubahan pola cuaca menyebabkan penurunan hasil panen dan meningkatkan kerentanan pangan. Strategi adaptif diperlukan melalui diversifikasi pangan lokal dan dukungan kelembagaan.
6	Susanti, H., & Rahmat, A. (2023). Peran Pemerintah Daerah	Menjelaskan peran pemerintah daerah dalam pengelolaan	Pemerintah daerah berperan penting melalui program cadangan pangan, subsidi transportasi distribusi, serta

⁴⁹ Miftahul, Q. (2021). *Strategi Peningkatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga Nelayan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan*. Balikpapan: Institut Teknologi Kalimantan.

⁵⁰ Arghniya, N. S. (2022). *Peran Pemerintah Daerah dalam Penanganan Kerawanan Pangan Masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Studi Implementasi Kebijakan Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar)*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

⁵¹ Lega, M. (2023). *Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Kabupaten Sleman (Studi Penelitian di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

⁵² Prasetyo, R. A., & Santosa, A. (2020). *Evaluasi Peran BULOG dalam Menstabilkan Harga Pangan Pokok di Masa Pandemi COVID-19*. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 7(2), 101–115.

⁵³ Ramadhani, D., & Fauziah, N. (2022). *Ketahanan Pangan Lokal dalam Perspektif Krisis Iklim: Studi Kasus di Kabupaten Lombok Timur*. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 14(1), 45–59.

	dalam Menjaga Stabilitas Pangan di Wilayah Rawan Krisis. ⁵⁴	ketahanan pangan di wilayah rentan.	sinergi dengan BULOG dan petani lokal.
7	Yusra, L., & Hidayati, M. (2021). Analisis Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas di Daerah Pesisir. ⁵⁵	Menganalisis strategi ketahanan pangan berbasis masyarakat di wilayah pesisir.	Ditemukan bahwa penguatan kelembagaan lokal, pelatihan pertanian berkelanjutan, dan akses terhadap pasar menjadi kunci keberhasilan menjaga ketahanan pangan komunitas di daerah pesisir.

Berdasarkan uraian pada tabel 2.1 tersebut, penelitian ini berfokus pada peran Perum BULOG dalam penanggulangan krisis pangan di Kabupaten Aceh Tengah, sebuah wilayah yang secara spesifik menghadapi tantangan pangan akibat kondisi geografis, keterbatasan infrastruktur, serta kerentanan iklim. Kajian ini menempatkan BULOG sebagai aktor utama dalam distribusi, penyediaan, dan stabilisasi pangan pokok, serta menelaah hambatan-hambatan yang bersifat lokal dan struktural. Hal ini membedakan penelitian ini dengan beberapa kajian sebelumnya yang berfokus pada aspek dan wilayah berbeda.

Sebagai perbandingan, penelitian Qorih Miftahul (2021) lebih menitikberatkan pada strategi internal rumah tangga nelayan dalam meningkatkan ketahanan pangan, bukan pada intervensi kelembagaan seperti BULOG. Sementara itu, Yusra & Hidayati (2021) menyoroti strategi ketahanan pangan berbasis komunitas di daerah pesisir, bukan pada kebijakan formal atau peran lembaga negara. Dengan demikian, kedua penelitian tersebut berorientasi mikro (rumah tangga dan komunitas), sedangkan penelitian ini berorientasi makro dengan melihat fungsi kelembagaan negara.

⁵⁴ Susanti, H., & Rahmat, A. (2023). *Peran Pemerintah Daerah dalam Menjaga Stabilitas Pangan di Wilayah Rawan Krisis*. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(3), 88–102.

⁵⁵ Yusra, L., & Hidayati, M. (2021). *Analisis Strategi Ketahanan Pangan Berbasis Komunitas di Daerah Pesisir*. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(2), 121–135.

Penelitian Arghniya (2022) dan Susanti & Rahmat (2023) memang telah membahas peran pemerintah daerah dalam menjaga ketahanan pangan, namun lebih menitikberatkan pada pembentukan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) dan sinergi dengan petani lokal. Berbeda dari penelitian ini yang secara khusus menganalisis mandat resmi Perum BULOG berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 dalam konteks penanganan krisis pangan di daerah rawan.

Sementara itu, penelitian Lega (2013) menggambarkan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman oleh Dinas Pertanian, yang mengalami kendala pada aspek SDM dan anggaran. Penelitian tersebut berfokus pada birokrasi lokal, sedangkan penelitian ini fokus pada BUMN pangan sebagai pelaksana fungsi nasional dalam konteks daerah yang rentan. Adapun Prasetyo & Santosa (2020) telah membahas peran BULOG, namun lebih dalam konteks nasional saat pandemi COVID-19, tanpa menyentuh dimensi krisis pangan lokal yang bersifat geografis seperti di Aceh Tengah.

Penelitian Ramadhani & Fauziah (2022) membahas ketahanan pangan dari sudut pandang perubahan iklim di Lombok Timur, menekankan pentingnya diversifikasi pangan dan adaptasi iklim. Penelitian ini melengkapi sudut pandang tersebut dengan mengaitkan kondisi iklim sebagai salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas BULOG di wilayah yang minim akses dan cadangan pangan.

Dengan demikian, perbedaan utama penelitian ini terletak pada:

- a. Fokus pada lembaga formal BUMN (Perum BULOG) sebagai aktor strategis dalam kebijakan pangan;

- b. Kajian lokasi spesifik di Kabupaten Aceh Tengah yang memiliki kondisi geografis dan sosial unik;
- c. Analisis terhadap kebijakan nasional yang diimplementasikan dalam konteks daerah rentan pangan, bukan hanya program berbasis komunitas atau rumah tangga;
- d. Pendekatan multidimensi, mencakup krisis pangan, faktor penghambat, dan indikator keberhasilan distribusi dan cadangan pangan.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dilakukan dengan *setting* tertentu yang ada di dalam kehidupan alamiah dengan maksud menginvestigasi dan memahami fenomena. Artinya riset kualitatif berbasis pada konsep *going exploring* yang melibatkan *in-depth and case-oriented studi* atau sejumlah kasus atau kasus tunggal.⁵⁶ Deskriptif adalah bentuk penelitian yang menggambarkan fenomena-fenomena baik yang dilakukan secara alami atau rekayasa. Dengan demikian penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dapat mengetahui peran Perum BULOG dalam penanggulangan krisis pangan serta melihat tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan ketahanan pangan di Aceh Tengah.

3.2. Fokus Penelitian

Tabel 3.1. Fokus Penelitian

No	Dimensi	Indikator	Sumber
1	Peran	1. Cadangan dan Distribusi Pangan 2. Stabilisasi dan Aksesibilitas Harga 3. Pemberdayaan dan Resiliensi Lokal	PP No. 17 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 2016; Pusat Data BULOG (2023); Bapanas & WFP (2022)
1	Krisis Pangan	1. Cadangan Pangan 2. Distribusi Pangan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015

⁵⁶ Muhammad Rijal Fadli “Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif”, Jurnal Mata Kuliah Umum, Vol. 21, No. 1 (2021), Hal. 35

		3. Stabilisasi Pangan	Tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
2	Faktor penghambat	1. Sumber Daya Manusia 2. Sumber Daya Alam 3. Iklim	

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor BULOG cabang Kabupaten Aceh tengah.

3.4. Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diambil langsung dari objek penelitian atau merupakan data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Pencarian data primer bisa dilakukan dengan cara wawancara dengan responden secara langsung melalui telepon, email dan sebagainya.⁵⁷
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara yang disebut juga dengan pihak kedua atau pihak lain. Dara sekunder dalam hal ini data yang diperoleh dari dokumen, publikasi, gambar dari media masa, undang-undang atau peraturan dan data lain yang dapat mendukung keberlangsungan penelitian ini.⁵⁸

⁵⁷ Turah Suhono Dan Hanif Al Fatta, "Penyusunan Data Primer Sebagai Dasar Interoperabilitas Sistem Informasi Pada Pemerintah Daerah Menggunakan Diagram Raci (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Purworejo)", Jurnal Jnnaloka, Vol. 2, No. 1, (2021), Hal.36

⁵⁸ Siti Sarah, Skripsi: "Implementasi Kebijakan Penertiban Hewan Ternak Di Kecamatan Darul Imarah", (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), Hal. 28

3.5. Informan Penelitian

Tabel 3. 2 Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1	Kepala Perum BULOG	1 Orang
2	Kepala Bidang Penanggulangan Pangan	1 Orang
3	Kepala Bidang Logistik	1 Orang
4	Petani	2 Orang
Jumlah		5 Orang

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi merupakan salah satu kegiatan ilmiah empiris yang mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui pengalaman panca indra tanpa menggunakan manipulasi apapun.⁵⁹ Observasi dalam penelitian ini dilaksanakan di wilayah yang menjadi fokus kajian kerawanan pangan, khususnya: Desa Gawet (Kecamatan Linge), Desa Rata (Kecamatan Kute Panang), Desa Paya Tampu (Kecamatan Rusip Antara). Selanjutnya, observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati kondisi infrastruktur pangan, distribusi logistik, aksesibilitas jalan, ketersediaan sarana penyimpanan (gudang BULOG), serta aktivitas masyarakat dalam mengakses pangan.
2. Wawancara, merupakan sebuah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*)

⁵⁹ Hasyim Hasanah, "Teknik-Teknik Observasi", Jurnal at-Taquaddum, Vol. 8, No. 1, (2016), Hal. 21

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*).⁶⁰ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara terstruktur dan semi-terstruktur dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam ketahanan pangan di Aceh Tengah, antara lain: (a) Pihak Perum BULOG Subdivre Takengon (sebagai pelaksana program pangan) (b) Dinas Pangan Aceh Tengah (pengelola data wilayah rawan pangan) (c) Aparat desa di Gawet, Rata, dan Paya Tampu (informasi kondisi lokal) (d) Masyarakat lokal, terutama kepala rumah tangga (pengalaman dan akses pangan)

3. Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk lisan, gambar atau karya-karya monumental dari sebuah kelompok dan individu.⁶¹ Dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi: (1) Dokumen Pemerintah Daerah (2) Dokumen dari Perum BULOG (3) Dokumentasi Lapangan (4) Peraturan dan Kebijakan Terkait.

3.7. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik analisis data dilakukan dengan menelaah informasi yang telah diperoleh baik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

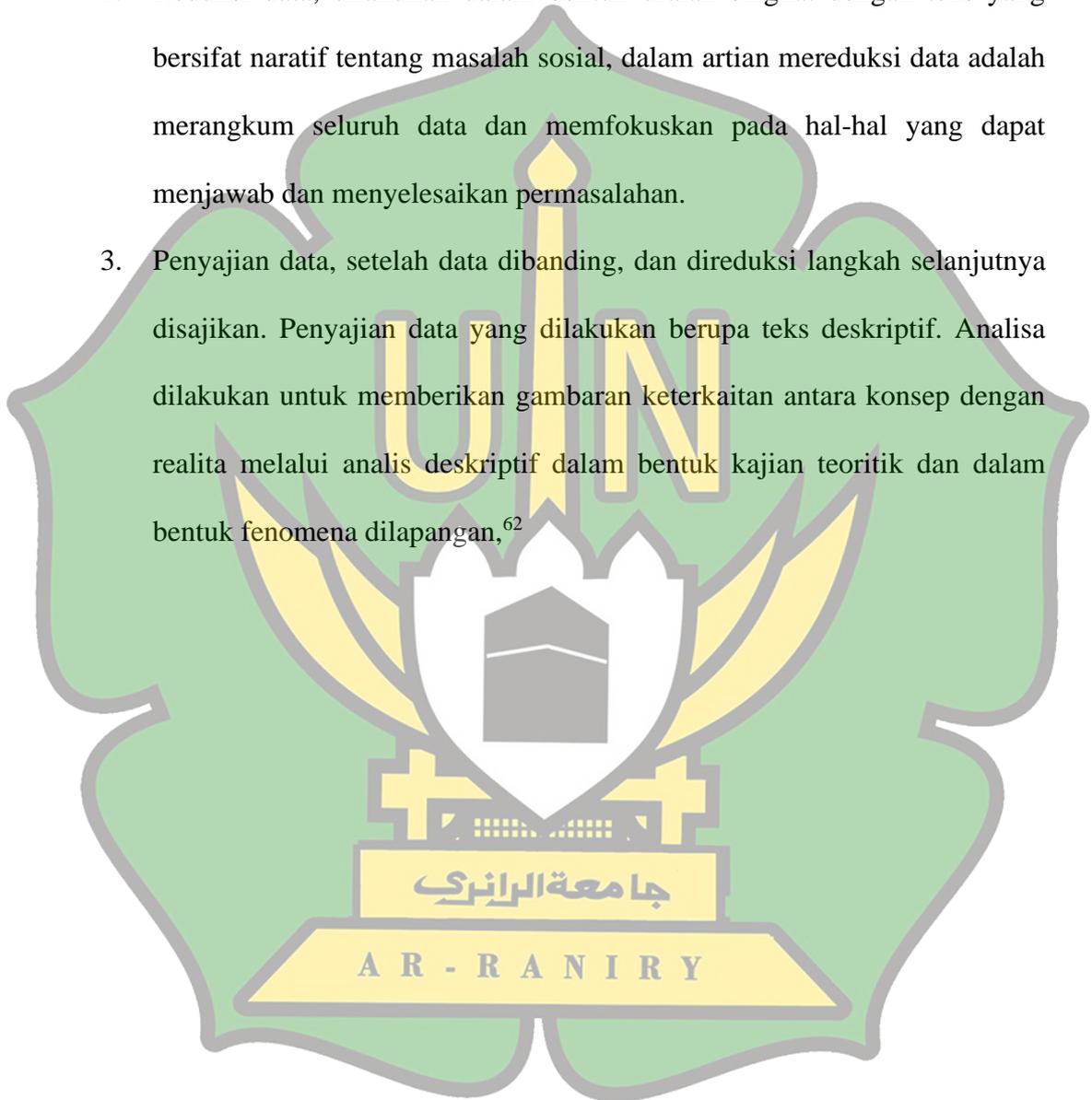
1. Triangulasi metode, adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data atau informasi yang diperoleh dari informan penelitian yang diragukan

⁶⁰ Sugiyono, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2013), Hal. 137

⁶¹ Lexy J. Moleong, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2007), Hal. 327

kebenarannya, dengan membandingkan data dan informasi yang diperoleh dari informan melalui cara yang berbeda.

2. Reduksi data, dilakukan dalam bentuk uraian singkat dengan teks yang bersifat naratif tentang masalah sosial, dalam artian mereduksi data adalah merangkum seluruh data dan memfokuskan pada hal-hal yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan.
3. Penyajian data, setelah data dibanding, dan direduksi langkah selanjutnya disajikan. Penyajian data yang dilakukan berupa teks deskriptif. Analisa dilakukan untuk memberikan gambaran keterkaitan antara konsep dengan realita melalui analisis deskriptif dalam bentuk kajian teoritik dan dalam bentuk fenomena dilapangan,⁶²



⁶² Siti Sarah, *Op. Cit.*, Hal. 33

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Aceh Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Aceh yang terletak di wilayah tengah Pulau Sumatera, dengan ibukota berada di Kota Takengon. Secara geografis, Aceh Tengah berada di kawasan dataran tinggi Gayo, dengan ketinggian antara 1.000–1.700 meter di atas permukaan laut. Luas wilayahnya mencapai ± 4.318 km² yang terdiri atas 14 kecamatan dan lebih dari 250 desa. Kabupaten ini dikelilingi oleh wilayah perbukitan dan danau, terutama Danau Lut Tawar yang menjadi ikon ekologis dan sumber air penting bagi pertanian dan konsumsi masyarakat.⁶³

Secara demografis, Kabupaten Aceh Tengah memiliki jumlah penduduk sekitar 223.000 jiwa, dengan komposisi etnis yang didominasi oleh masyarakat Gayo, yang mayoritas berprofesi sebagai petani.⁶⁴ Komoditas utama yang dihasilkan adalah kopi arabika Gayo, yang telah memperoleh pengakuan geografis (*Geographical Indication*) dan menjadi salah satu komoditas ekspor unggulan Indonesia. Selain kopi, masyarakat juga menanam padi, jagung, cabai, dan hortikultura lainnya sebagai sumber ketahanan pangan lokal.

Dalam konteks ketahanan pangan, Aceh Tengah menghadapi tantangan khas daerah dataran tinggi, seperti terbatasnya lahan pertanian produktif,

⁶³ BPS Kabupaten Aceh Tengah. *Kabupaten Aceh Tengah Dalam Angka 2023*. Takengon: BPS, 2023.

⁶⁴ Kementerian Pertanian. *Profil Ketahanan Pangan Provinsi Aceh*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2021.

kerentanan terhadap perubahan iklim (*climate variability*), dan kesenjangan infrastruktur transportasi antar kecamatan. Beberapa wilayah terpencil masih sulit dijangkau oleh kendaraan logistik karena keterbatasan infrastruktur jalan dan risiko longsor saat musim hujan. Kondisi ini dapat memperlambat distribusi pangan dan menjadi faktor penghambat dalam penanggulangan krisis pangan, terutama ketika terjadi gangguan rantai pasok (*supply chain disruption*).

Berdasarkan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA*) yang dirilis oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan *World Food Programme*⁶⁵, Aceh Tengah masuk dalam kategori kabupaten dengan ketahanan pangan sedang, tetapi memiliki sejumlah kecamatan yang tergolong rentan terhadap gangguan pasokan dan distribusi pangan. Indikator seperti prevalensi balita stunting, akses terhadap air bersih, dan tingkat kemiskinan menjadi penentu dalam kerentanan wilayah ini terhadap krisis pangan.

Peran Perum BULOG menjadi penting dalam konteks ini. Sebagai lembaga yang ditugaskan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan strategis, BULOG memiliki gudang penyimpanan dan jaringan distribusi yang aktif di Aceh Tengah. Keberadaan BULOG menjadi penopang sistem pangan lokal dalam kondisi darurat, seperti gagal panen, inflasi harga beras, maupun bencana alam. Pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan dan instansi teknis lainnya, juga berperan dalam penguatan sistem peringatan dini pangan dan program intervensi berbasis data local.⁶⁶

⁶⁵ Badan Pangan Nasional & World Food Programme. *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Jakarta: Bapanas dan WFP, 2022.

⁶⁶ Pusat Data dan Informasi Perum BULOG. *Laporan Operasional BULOG Wilayah Aceh Tengah*. Jakarta: Perum BULOG, 2023.

Selain itu, isu perubahan iklim menjadi tantangan krusial. Berdasarkan studi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisik⁶⁷, wilayah dataran tinggi Gayo termasuk dalam zona dengan fluktuasi musim tanam yang tidak menentu dan curah hujan ekstrem. Hal ini berdampak langsung pada pola tanam petani dan produktivitas lahan, sehingga dapat memicu krisis pasokan pangan musiman yang harus ditangani dengan respons cepat dari lembaga terkait.

Secara umum, Kabupaten Aceh Tengah merupakan daerah yang kaya secara sumber daya alam dan budaya, namun memiliki kerentanan struktural terhadap krisis pangan akibat tantangan geografis, perubahan iklim, dan distribusi yang belum merata. Oleh karena itu, keberadaan Perum BULOG dan koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi salah satu aspek strategis dalam menciptakan sistem ketahanan pangan yang adaptif dan berkelanjutan di wilayah ini.

4.2 Peran Perum BULOG dalam Penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten Aceh Tengah

Krisis pangan merupakan kondisi yang ditandai dengan keterbatasan akses fisik maupun ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman, dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan hidup yang aktif dan sehat. Dalam konteks Kabupaten Aceh Tengah sebuah wilayah dengan topografi pegunungan dan populasi yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian keberadaan lembaga strategis seperti Perum BULOG menjadi krusial dalam menjaga stabilitas pangan,

⁶⁷ BMKG. *Proyeksi Iklim Wilayah Aceh: Risiko dan Adaptasi di Sektor Pertanian*. Jakarta: BMKG, 2022.

khususnya saat terjadi gangguan pasokan, musim paceklik, atau inflasi harga pangan pokok.

Penelitian ini menemukan bahwa Perum BULOG berperan penting dalam tiga aspek utama penanggulangan krisis pangan, yakni: (1) penyediaan cadangan pangan; (2) distribusi pangan ke daerah rawan; dan (3) stabilisasi harga dan pasokan pangan. Temuan ini diperoleh dari triangulasi data melalui wawancara mendalam dengan lima informan, yaitu Kepala Perum BULOG Aceh Tengah, Kepala Bidang Penanggulangan Pangan di Pemerintah Daerah, Kepala Bidang Logistik BULOG, dan dua orang petani lokal.

4.2.1 Penyediaan Cadangan Pangan

Penyediaan cadangan pangan merupakan salah satu mandat fundamental Perum BULOG dalam mendukung ketahanan pangan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi. Dalam konteks Kabupaten Aceh Tengah sebuah daerah agraris yang rawan terhadap fluktuasi iklim dan tantangan geografis cadangan pangan, khususnya Cadangan Beras Pemerintah (CBP), menjadi instrumen krusial dalam mengantisipasi dan merespons dinamika kerawanan pangan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perum BULOG Aceh Tengah telah menjadikan penyediaan cadangan pangan sebagai prioritas strategis dalam program kerjanya. Gudang BULOG yang berlokasi di pusat kabupaten memiliki kapasitas lebih dari 1.000 ton dan dirancang untuk menjamin ketersediaan stok dalam kondisi darurat. Proses penyimpanan dilakukan secara sistematis dengan

prinsip rotasi stok berkala guna menjaga kualitas dan kelayakan beras yang disimpan. Setiap batch stok memiliki masa simpan tertentu yang dikendalikan melalui prosedur rotasi, inspeksi fisik, dan peremajaan secara berkala.

Dalam wawancara mendalam, Kepala Perum BULOG menjelaskan bahwa:

“Kami rutin melakukan rotasi stok agar beras dalam gudang tetap dalam kondisi layak konsumsi. Setiap tiga bulan dilakukan pengecekan kualitas dan peremajaan. Kerja sama dengan Pemda juga penting untuk memastikan bahwa penyaluran dilakukan sesuai kebutuhan dan tepat waktu, terutama saat situasi darurat seperti bencana alam atau gagal panen.”⁶⁸

Pernyataan ini menegaskan bahwa BULOG tidak hanya berperan sebagai pengelola logistik semata, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam mendukung kebijakan darurat pangan daerah. Fungsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan dijalankan melalui koordinasi teknis lintas lembaga, termasuk dengan Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Sosial, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

Kepala Bidang Logistik menambahkan bahwa perencanaan volume cadangan setiap tahunnya disesuaikan dengan data proyeksi kebutuhan yang diberikan oleh pemerintah daerah, yang meliputi potensi kerawanan pangan, jumlah penduduk, kondisi geografis, dan tren harga pangan:

“Setiap awal tahun kami menerima proyeksi kebutuhan CBP dari Pemda, dan dari situ kami hitung berapa volume minimum yang harus disiapkan.

⁶⁸ Suhadi, Kepala Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 09.00 WIB.

Biasanya ini mencakup skenario normal dan skenario krisis, jadi fleksibilitas penting.”⁶⁹

Hal ini menunjukkan adanya mekanisme perencanaan berbasis data (*evidence-based planning*) yang menjadi landasan dalam pengambilan keputusan operasional BULOG. *Evidence-Based Planning* (EBP) atau perencanaan berbasis bukti sendiri merupakan pendekatan dalam proses perencanaan yang mengandalkan data, informasi, dan temuan empiris (hasil riset atau bukti lapangan) untuk merumuskan kebijakan, program, atau strategi. Tujuannya adalah agar keputusan yang diambil lebih rasional, tepat sasaran, dan efektif karena didasarkan pada realitas yang terukur, bukan sekadar asumsi, intuisi, atau tekanan politik. Oleh karena itu proyeksi kebutuhan juga mempertimbangkan dinamika musim tanam dan panen, yang di Aceh Tengah sangat dipengaruhi oleh curah hujan tinggi dan variasi iklim mikro wilayah.

Selain penyimpanan dan rotasi, BULOG juga berperan dalam perencanaan intervensi pangan berbasis spasial. Kerja sama antara BULOG dan Dinas Ketahanan Pangan dilakukan untuk menyusun peta wilayah rawan pangan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan dalam sistem monitoring pemerintah, seperti prevalensi kemiskinan, produksi lokal, serta aksesibilitas geografis. Peta ini kemudian menjadi dasar dalam penyusunan alokasi CBP ke daerah-daerah prioritas. Kerja sama antara BULOG dan Dinas Ketahanan Pangan sendiri yaitu bagian dari mengintegrasikan peran dan data kedua lembaga untuk menyusun peta

⁶⁹ Puadi M, Kepala Bidang Logistik Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 10.00 WIB.

wilayah rawan pangan yang akurat dan berbasis bukti (*evidence-based*), guna mendukung perencanaan dan intervensi pangan yang lebih tepat sasaran.

Cadangan beras tersebut selanjutnya digunakan untuk intervensi darurat dalam berbagai skenario, seperti lonjakan harga, gagal panen akibat perubahan cuaca ekstrem, serta distribusi bantuan sosial pada saat bencana alam. Dalam situasi seperti itu, CBP berfungsi sebagai stabilisator utama untuk mencegah kelangkaan pangan dan menjaga daya beli masyarakat miskin serta rentan.

Dengan demikian, dari aspek penyediaan cadangan pangan, dapat disimpulkan bahwa Perum BULOG Aceh Tengah telah menjalankan perannya secara sistematis dan responsif, berbasis pada prinsip pengelolaan stok yang efisien, kerja sama lintas sektor, dan sensitivitas terhadap dinamika lokal. Fungsi ini tidak hanya memperkuat kapasitas daerah dalam menghadapi potensi krisis pangan, tetapi juga menjadi pilar utama dalam sistem ketahanan pangan daerah yang inklusif dan adaptif.

4.2.2 Distribusi Pangan ke Daerah Rawan

Distribusi pangan merupakan salah satu elemen krusial dalam manajemen ketahanan pangan di daerah, terlebih di wilayah yang secara geografis memiliki karakteristik sulit dijangkau seperti Kabupaten Aceh Tengah. Kabupaten ini didominasi oleh topografi pegunungan dengan akses jalan yang terbatas dan sering kali rusak saat musim hujan. Dalam konteks ini, Perum BULOG berperan aktif dalam menjamin tersedianya pangan di daerah rawan melalui strategi distribusi logistik yang fleksibel dan adaptif terhadap kondisi medan.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Bidang Logistik, diperoleh informasi bahwa BULOG menghadapi tantangan nyata dalam mengirimkan pangan ke wilayah seperti Kecamatan Rusip Antara, Bies, Linge, dan Atu Lintang. Informan menyatakan bahwa keterbatasan infrastruktur membuat pengiriman tidak bisa dilakukan dengan sistem distribusi reguler, melainkan perlu strategi khusus. Ia menyampaikan:

“Distribusi pangan ke beberapa kecamatan seperti Rusip Antara dan Linge memang tidak bisa kami perlakukan seperti daerah kota. Jalan ke sana kadang rusak parah atau bahkan tertutup tanah longsor saat musim hujan. Untuk itu, kami menyaliasi dengan menyimpan cadangan di gudang pembantu yang lebih dekat ke wilayah rawan. Gudang ini tidak sebesar gudang utama, tapi cukup untuk memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat sekitar. Selain itu, kami bekerja sama dengan Dinas Perhubungan untuk memantau kondisi jalan dan dengan pihak TNI untuk bantuan distribusi ke lokasi yang sangat sulit dijangkau.”⁷⁰

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BULOG tidak hanya berfokus pada distribusi satu arah, tetapi juga melakukan antisipasi berbasis perencanaan risiko geografis, di mana lokasi penempatan stok menjadi bagian dari strategi adaptif terhadap tantangan medan. Informan menegaskan bahwa prinsip yang digunakan adalah: “lebih baik stok dekat dengan warga daripada cepat rusak karena tidak terjangkau”.

Selanjutnya, Kepala Bidang Penanggulangan Pangan menjelaskan peran BULOG dari sisi koordinasi kebijakan pangan daerah. Ia menekankan bahwa kerja sama antara pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dan BULOG telah

⁷⁰ Puadi M, Kepala Bidang Logistik Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 10.00 WIB.

dilakukan melalui forum koordinasi ketahanan pangan untuk merespons lonjakan harga atau situasi darurat:

“Ketika kami mendapatkan laporan tentang potensi gagal panen di suatu wilayah atau ada gejolak harga beras yang tajam, kami langsung berkoordinasi dengan pihak BULOG. Kami identifikasi wilayah mana saja yang paling terdampak, seperti daerah yang pasarnya jauh dan aksesnya terbatas. BULOG kemudian menyalurkan beras ke sana, baik melalui operasi pasar maupun distribusi langsung. Kami menganggap peran BULOG sangat penting karena tidak semua instansi punya kemampuan logistik sebesar mereka. Kadang distribusi dilakukan bersamaan dengan kegiatan bantuan sosial atau intervensi harga.”⁷¹

Keterangan ini memperlihatkan bahwa BULOG diposisikan sebagai mitra utama dalam kebijakan responsif terhadap krisis pangan lokal, khususnya dalam konteks intervensi terarah berdasarkan data kerentanan.

Sementara itu, wawancara dengan dua orang petani dari Kecamatan Ketol dan Rusip Antara memberikan sudut pandang dari sisi penerima manfaat. Petani menjelaskan bahwa keberadaan distribusi beras BULOG ke wilayahnya sangat membantu saat hasil panen menurun drastis akibat hujan lebat:

“Dulu kalau musim hujan panjang, padi kami bisa rusak semua, dan kami harus beli beras ke kota. Tapi sekarang ada beras dari BULOG yang masuk ke kampung. Biasanya dijual lewat warung atau dibagikan saat bantuan. Waktu harga pasar naik tinggi tahun lalu, kami masih bisa beli beras dari BULOG yang harganya tidak berubah. Itu sangat membantu kami untuk bertahan, terutama bagi keluarga yang tidak punya simpanan beras.”⁷²

Petani menambahkan bahwa:

⁷¹ Mawardi, Kepala Bidang Penanggulangan Pangan Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 11.00 WIB.

⁷² Marzuki, Petani pada Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 14.00 WIB.

“Kami merasa lebih aman kalau tahu ada stok beras di dekat kampung. Tidak harus pergi jauh, dan walaupun uang sedang tidak banyak, kami tahu masih bisa beli beras BULOG yang lebih murah. Kami juga sering dengar dari aparat desa bahwa BULOG sudah punya gudang kecil dekat sini, jadi distribusinya lebih cepat kalau dibutuhkan.”⁷³

Testimoni ini memberikan gambaran bahwa distribusi BULOG bukan hanya menyentuh aspek teknis logistik, tetapi juga memberikan dampak sosial dan psikologis kepada masyarakat, terutama petani yang rentan terhadap fluktuasi iklim dan pasar. Dengan distribusi yang terencana, warga desa tidak hanya memiliki akses terhadap pangan fisik, tetapi juga memiliki jaminan keberlangsungan hidup pada masa krisis.

Secara konseptual, distribusi pangan oleh BULOG di Aceh Tengah mencerminkan penerapan prinsip kewaspadaan dini (*early warning*) dan respons cepat (*rapid response*) yang diintegrasikan dalam sistem ketahanan pangan nasional. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi dalam *Food Security and Vulnerability Atlas (2022)* yang menekankan pentingnya ketepatan waktu dan tempat dalam distribusi pangan, terutama di wilayah rentan bencana dan keterisolasian geografis.

4.2.3 Stabilisasi Harga dan Pasokan

Stabilisasi harga dan pasokan pangan merupakan salah satu mandat strategis Perum BULOG dalam mendukung ketahanan pangan nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2016 tentang Penugasan kepada Perum BULOG dalam Rangka Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga. Di Kabupaten Aceh Tengah, peran ini diwujudkan melalui

⁷³ Mansyur, Petani pada Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 15.00 WIB.

kegiatan Operasi Pasar (OP) dan pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang diarahkan untuk menekan gejolak harga, menjaga daya beli masyarakat, serta menjamin kontinuitas pasokan pangan pokok.

Kegiatan Operasi Pasar yang dilakukan BULOG difokuskan pada komoditas strategis, terutama beras medium, sebagai bahan pangan pokok masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Penanggulangan Pangan, diketahui bahwa BULOG telah menjadi mitra utama pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah dalam menjaga stabilitas harga, khususnya menjelang periode-periode sensitif seperti Ramadan, Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN), dan musim paceklik.

“Dalam konteks Aceh Tengah yang rentan terhadap fluktuasi pasokan pangan akibat faktor iklim dan infrastruktur yang belum merata, Operasi Pasar yang dilakukan oleh BULOG menjadi salah satu instrumen yang sangat penting. Kami di Dinas Ketahanan Pangan secara rutin melakukan koordinasi dengan pihak BULOG, khususnya menjelang momen-momen seperti Ramadan, Idul Fitri, dan ketika terindikasi adanya lonjakan harga dari pantauan pasar harian kami. Biasanya, kita langsung rapat dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk menyusun skema penyaluran. BULOG kemudian menyediakan stoknya dan kami bantu untuk menyusun titik distribusi dan kelompok sasaran. Ini semua agar harga beras bisa ditekan dan masyarakat tetap bisa mengaksesnya meski harga di pasar umum sedang naik. Bahkan dalam beberapa kasus, BULOG mampu menjual beras medium dengan harga di bawah HET nasional, dan itu sangat berdampak positif terhadap daya beli rumah tangga miskin.”⁷⁴

Pada tahun 2023, berdasarkan laporan dari Perum BULOG Wilayah Aceh Tengah, tercatat terdapat 15 titik Operasi Pasar yang tersebar di seluruh kecamatan, seperti di Takengon, Bebesen, Ketol, dan Celala. Titik-titik ini

⁷⁴ Mawardi, Kepala Bidang Penanggulangan Pangan Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 11.00 WIB.

diprioritaskan pada wilayah padat penduduk dan pasar tradisional yang menjadi sentra transaksi pangan. BULOG menjaga agar harga jual di bawah Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah, sehingga mampu menekan inflasi pangan daerah yang kerap melonjak saat distribusi terganggu atau produksi lokal menurun.

Lebih lanjut, BULOG juga menjalankan mekanisme penyesuaian volume penyaluran yang didasarkan pada data mingguan dari Dinas Ketahanan Pangan dan laporan dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Dengan cara ini, BULOG memastikan bahwa intervensi harga tidak dilakukan secara seragam, tetapi berdasarkan profil kebutuhan lokal dan sensitivitas harga pasar per kecamatan. Pendekatan ini menandai pergeseran dari kebijakan reaktif menjadi respons yang berbasis data dan prediksi (*data-driven intervention*).

Wawancara dengan petani yang juga merupakan pedagang kecil di pasar kampung, memperlihatkan dampak dari OP BULOG terhadap kondisi ekonomi mikro masyarakat:

“Waktu musim hujan panjang kemarin, banyak sawah yang gagal panen. Harga beras di pasar langsung naik, sampai Rp13.000 lebih. Itu bikin orang-orang susah beli, apalagi yang pendapatannya harian. Tapi waktu BULOG datang dan jual beras murah di lapangan pasar, masyarakat langsung beli. Harga yang ditawarkan BULOG waktu itu sekitar Rp9.000 per kilo, jauh di bawah harga pasar. Jadi, walaupun saya sendiri juga jualan beras dan sayur, kehadiran BULOG nggak bikin saya rugi. Justru membantu karena orang tetap belanja barang lain dari saya. Kalau nggak ada Operasi Pasar, mungkin pasar bisa lumpuh. Kami sebagai petani dan pedagang kecil sangat merasakan manfaatnya. Bahkan kadang kami juga beli untuk konsumsi di rumah, karena lebih murah dan kualitasnya masih bagus.”⁷⁵

⁷⁵ Marzuki, Petani pada Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 14.00 WIB.

Testimoni ini mengungkapkan bahwa stabilisasi harga tidak hanya berdampak pada konsumen, tetapi juga memberikan efek lanjutan pada ekonomi lokal, terutama pelaku pasar mikro dan petani kecil, yang sering kali terdampak secara tidak langsung oleh fluktuasi harga pangan.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antara BULOG dan pemerintah daerah dilakukan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang secara rutin menggelar evaluasi kondisi harga dan pasokan pangan. BULOG sebagai anggota tetap TPID memiliki wewenang untuk memberikan masukan terkait kondisi stok, estimasi kebutuhan, dan kesiapan distribusi logistik, yang kemudian dijadikan dasar untuk keputusan intervensi harga.

Tugas TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah) secara umum adalah mengendalikan inflasi di daerah melalui koordinasi lintas sektor, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan ketersediaan pasokan pangan. TPID dibentuk berdasarkan instruksi Presiden (Inpres No. 3 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengendalian Inflasi), dan beranggotakan unsur pemerintah daerah, Bank Indonesia, BPS, Dinas Ketahanan Pangan, BULOG, serta instansi lainnya.

Secara konseptual, intervensi BULOG dalam stabilisasi harga berkontribusi terhadap tercapainya empat pilar utama ketahanan pangan, yakni: ketersediaan (*availability*), akses (*accessibility*), pemanfaatan (*utilization*), dan stabilitas (*stability*). Dalam hal ini, fokus BULOG berada pada aspek stabilitas, baik dari sisi harga maupun kelancaran pasokan. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi dalam *Food Security and Vulnerability Atlas* (Badan Pangan Nasional & WFP, 2022), yang menyebutkan bahwa keberhasilan distribusi dan

pengendalian harga pangan di wilayah rentan sangat tergantung pada kapasitas lembaga logistik pangan dalam mengantisipasi fluktuasi pasar.

Dengan demikian, peran BULOG dalam stabilisasi harga dan pasokan pangan di Kabupaten Aceh Tengah tidak hanya menjawab tantangan teknis berupa fluktuasi pasokan dan harga, tetapi juga memperkuat jaringan perlindungan sosial ekonomi masyarakat. Pendekatan kolaboratif yang dilaksanakan antara BULOG dan pemerintah daerah menegaskan pentingnya intervensi negara dalam mekanisme pasar, khususnya dalam menjamin keadilan pangan di wilayah terpencil dan rentan terhadap krisis.

4.3 Tantangan yang Dihadapi Perum BULOG dalam Penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten Aceh Tengah

Perum BULOG sebagai aktor utama dalam pengelolaan pangan strategis di Kabupaten Aceh Tengah menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan multidimensional. Tantangan tersebut mencakup aspek sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam dan infrastruktur, serta perubahan iklim yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap stabilitas sistem pangan lokal. Data ini diperoleh melalui wawancara dengan lima informan kunci yang mencerminkan perspektif kelembagaan dan masyarakat, termasuk pejabat BULOG, pemerintah daerah, serta petani lokal.

4.3.1 Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas dan kapasitas sumber daya manusia (SDM) menjadi aspek fundamental dalam keberhasilan implementasi kebijakan ketahanan pangan, termasuk dalam pelaksanaan tugas operasional Perum BULOG. Di wilayah

Kabupaten Aceh Tengah, kendati kuantitas personel operasional BULOG tergolong memadai, namun dari sisi kompetensi dan adaptabilitas terhadap perkembangan sistem teknologi informasi logistik masih ditemukan sejumlah keterbatasan signifikan. Tantangan ini terutama dirasakan dalam konteks peningkatan tuntutan digitalisasi proses distribusi pangan dan efisiensi pelayanan publik berbasis data.

Kepala Perum BULOG Aceh Tengah menegaskan bahwa salah satu tantangan mendasar adalah keterbatasan kemampuan staf teknis dalam mengoperasikan sistem digital logistik dan pelaporan elektronik:

"Dari segi jumlah pegawai, kami relatif tidak kekurangan. Namun, sebagian besar staf kami masih belum familiar dengan penggunaan sistem distribusi logistik berbasis digital, seperti aplikasi pemantauan stok dan pelaporan berbasis web. Padahal sekarang itu sangat penting untuk pengambilan keputusan cepat. Beberapa kali kami mengadakan pelatihan, tapi belum semua bisa langsung menerapkan. Apalagi di unit gudang pembantu, kadang hanya satu staf teknis yang pegang beberapa tanggung jawab. Jadi, efektivitas distribusi masih banyak bergantung pada kemampuan manual dan pengalaman lapangan."⁷⁶

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital yang tengah didorong oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih belum sepenuhnya terimplementasi di level teknis-operasional BULOG daerah. Hal ini tentu berdampak pada keterlambatan pelaporan stok, lambannya proses analisis kebutuhan distribusi, dan berkurangnya kecepatan tanggap terhadap kondisi krisis pangan yang dinamis.

⁷⁶ Suhadi, Kepala Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 09.00 WIB.

Selain itu, aspek regenerasi SDM juga menjadi sorotan penting. menambahkan bahwa terjadi kekosongan kompetensi akibat pensiunnya sejumlah tenaga teknis berpengalaman, tanpa disertai dengan proses alih pengetahuan (*knowledge transfer*) yang optimal kepada pegawai baru atau tenaga kontrak.

“Sebagian staf teknis yang senior mulai pensiun, tapi regenerasinya tidak cepat. Pegawai kontrak juga sering berganti karena kurangnya insentif dan beban kerja tinggi, terutama di daerah yang aksesnya sulit. Ini membuat keberlanjutan layanan kami terganggu.”⁷⁷

Dari sisi manajemen organisasi, masalah ini menciptakan ketergantungan yang tinggi pada individu tertentu dan berpotensi melemahkan keberlanjutan program jangka panjang. Sistem rotasi dan peningkatan kapasitas (*capacity building*) dinilai belum berjalan merata, terutama di unit-unit terpencil.

Keterbatasan SDM ini turut mempengaruhi sinergi antara Perum BULOG dan instansi pemerintah daerah. Sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Pangan, kolaborasi dalam penyaluran bantuan dan intervensi harga kerap menemui kendala komunikasi:

“Kami kadang harus tunggu laporan dari gudang BULOG untuk mengetahui berapa stok yang tersedia dan kapan bisa disalurkan. Kalau staf yang pegang data sedang tugas luar atau belum input ke sistem, koordinasi jadi lambat. Ini penting untuk diperbaiki, apalagi dalam situasi darurat seperti kenaikan harga atau gagal panen.”⁷⁸

Dengan demikian, tantangan sumber daya manusia di tubuh Perum BULOG bukan hanya menyangkut keterampilan teknis, tetapi juga sistem manajerial, insentif kerja, serta desain struktur organisasi yang adaptif terhadap

⁷⁷ Suhadi, Kepala Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 09.00 WIB.

⁷⁸ Mawardi, Kepala Bidang Penanggulangan Pangan Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 11.00 WIB.

tantangan geografis dan teknologi. Untuk memperkuat peran BULOG dalam penanggulangan krisis pangan, diperlukan strategi peningkatan kompetensi SDM secara menyeluruh, mulai dari pelatihan berbasis teknologi, penguatan insentif dan karier, hingga sistem monitoring evaluasi kinerja berbasis indikator output pelayanan publik.

4.3.2 Faktor Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Kondisi geografis Kabupaten Aceh Tengah yang didominasi oleh bentang alam pegunungan dan lembah menciptakan tantangan tersendiri dalam pelaksanaan distribusi pangan yang merata, cepat, dan efisien. Wilayah ini terdiri atas kecamatan-kecamatan dengan aksesibilitas terbatas, terutama saat musim hujan atau terjadi bencana alam seperti longsor dan banjir bandang. Daerah seperti Linge, Bies, Jagong Jeget, dan Rusip Antara tercatat sebagai wilayah yang paling sering mengalami hambatan dalam proses distribusi, baik karena infrastruktur jalan yang rusak maupun jarak tempuh yang cukup jauh dari pusat gudang utama BULOG.

Kepala Bidang Logistik Perum BULOG menggambarkan realitas tersebut sebagai berikut:

"Banyak jalan di daerah pegunungan itu masih tanah dan belum beraspal. Jadi kalau hujan deras, kendaraan roda empat tidak bisa lewat karena licin dan berlumpur. Kami terpaksa menggunakan sepeda motor atau bahkan menunggu beberapa hari sampai kondisi jalan bisa dilalui. Pernah waktu itu, distribusi ke Jagong Jeget tertunda lebih dari seminggu karena ada longsor besar yang menutup jalan. Kami harus menunggu alat berat dari kabupaten membersihkan dulu. Ini jelas berdampak pada keterlambatan penyaluran bantuan pangan."

"Untuk mengantisipasi kondisi seperti itu, kami sekarang mulai siapkan gudang pembantu atau tempat penyimpanan sementara di lokasi yang

lebih dekat ke titik rawan. Tapi itu juga tidak mudah karena harus koordinasi dengan desa atau kecamatan, dan tempat penyimpanannya pun kadang tidak standar. Risiko kerusakan beras jadi tinggi kalau tempatnya lembap atau tidak memiliki sirkulasi udara yang baik.”⁷⁹

Permasalahan infrastruktur tidak hanya mencakup kondisi jalan, tetapi juga ketersediaan dan kelayakan fasilitas pergudangan. Hingga saat ini, Perum BULOG Aceh Tengah hanya memiliki satu gudang induk utama yang berlokasi di pusat kota Takengon. Untuk menjangkau kecamatan-kecamatan yang jauh, BULOG harus menyewa tempat penyimpanan tambahan atau menjalin kerja sama dengan pemerintah desa dan lembaga lokal lainnya.

“Idealnya, setiap kecamatan rawan itu punya gudang kecil atau buffer stock center sendiri, supaya distribusi bisa langsung dilakukan tanpa harus bolak-balik ke gudang induk. Tapi karena anggaran terbatas, kami hanya bisa fokus di beberapa titik prioritas. Kadang stok kami titip di kantor camat atau balai desa. Tapi itu tidak menjamin keamanan dan kualitas penyimpanan. Kalau beras diletakkan terlalu lama di tempat yang lembap, bisa rusak atau diserang hama,”⁸⁰

Selain infrastruktur distribusi BULOG, kondisi sumber daya alam yang semakin terbatas turut memperburuk ketahanan pangan lokal. Para petani di Aceh Tengah mengeluhkan terbatasnya akses terhadap sarana produksi pertanian seperti pupuk, irigasi, dan bibit unggul. Hal ini berdampak langsung terhadap produktivitas lahan dan ketahanan pangan rumah tangga, terutama pada musim-musim kritis seperti kemarau panjang atau hujan ekstrem.

Petani dari Kecamatan Ketol menuturkan:

⁷⁹ Puadi M, Kepala Bidang Logistik Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 10.00 WIB.

⁸⁰ Puadi M, Kepala Bidang Logistik Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 10.00 WIB.

“Kami susah sekali dapat pupuk subsidi sekarang. Kadang stoknya habis di distributor, jadi harus beli dari luar daerah dengan harga dua kali lipat. Kalau sudah seperti itu, banyak petani yang mengurangi jumlah tanam atau malah tidak tanam sama sekali. Selain itu, saat musim kemarau, air susah sekali. Irigasi di kampung kami kecil, dan sumber mata airnya banyak yang kering. Jadi kalau panen gagal, masyarakat tidak punya pilihan lain selain beli beras dari BULOG.”⁸¹

Sementara itu, petani dari Silih Nara menggarisbawahi dampak buruk dari keterbatasan akses jalan terhadap distribusi pangan dan hasil pertanian:

“Kalau jalan rusak atau ada longsor, truk dari BULOG tidak bisa masuk. Kadang kami tunggu sampai tiga hari baru bisa dapat beras. Di pasar juga jadi langka, dan harganya naik. Di sisi lain, kami juga sebagai petani susah jual hasil panen ke kota karena biaya angkut tinggi. Harga jual jadi tidak sebanding dengan ongkos. Ini menyulitkan kami dari dua sisi: produksi berkurang, harga naik, dan akses terbatas. Jadi bukan cuma soal distribusi beras ke kami, tapi kami juga kesulitan menggerakkan hasil pertanian keluar dari desa.”⁸²

Temuan ini memperlihatkan bahwa ketahanan pangan di Aceh Tengah sangat rentan terhadap interaksi antara faktor sumber daya alam yang semakin terbatas dan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Minimnya akses jalan, keterbatasan gudang, dan kesulitan petani dalam mendapatkan input produksi menyebabkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap cadangan pangan pemerintah, khususnya dari BULOG.

Sebagai upaya mitigatif, Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketahanan Pangan mulai mengembangkan konsep “lumbung pangan desa” yang melibatkan komunitas lokal dan perangkat desa dalam pengelolaan stok pangan cadangan di

⁸¹ Mansyur, Petani pada Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 15.00 WIB.

⁸² Marzuki, Petani pada Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 14.00 WIB.

wilayah rawan. Namun, implementasi kebijakan ini masih membutuhkan pendampingan teknis, pendanaan yang memadai, dan dukungan logistik dari BULOG agar dapat berjalan optimal dan menjangkau seluruh kecamatan terpencil.

4.3.3 Faktor Iklim

Perubahan iklim global telah memberikan dampak nyata di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Aceh Tengah. Wilayah ini, yang secara geografis terletak di kawasan pegunungan dengan sistem ekologi yang rentan, semakin mengalami ketidakpastian dalam siklus musim tanam, intensitas curah hujan yang tidak menentu, dan meningkatnya frekuensi bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang dan tanah longsor. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada sektor pertanian sebagai sumber produksi pangan utama, tetapi juga secara signifikan mengganggu sistem logistik dan distribusi pangan yang dijalankan oleh Perum BULOG.

Kepala Perum BULOG mengemukakan bahwa cuaca ekstrem telah menjadi salah satu hambatan utama dalam pelaksanaan distribusi pangan:

“Cuaca menjadi variabel yang sangat sulit kami kendalikan. Ada kalanya jadwal pengiriman sudah disusun dengan baik, armada logistik siap, dan stok beras sudah dikemas di gudang. Tapi tiba-tiba hujan deras turun selama tiga sampai lima hari. Beberapa titik distribusi menjadi tidak bisa diakses karena banjir atau longsor. Bahkan ada yang harus kami alihkan rutenya karena jalan utama terputus. Ini tentu menyebabkan keterlambatan pengiriman, dan juga berisiko pada kualitas beras karena tingkat kelembapan di gudang sementara bisa naik.”

“Kami mulai merancang sistem logistik adaptif, termasuk menjalin kerja sama dengan BMKG. Jadi, sebelum melakukan distribusi ke daerah rawan, kami cek dulu prakiraan cuaca selama seminggu ke depan. Harapannya,

pengiriman bisa lebih presisi dan tidak tertunda. Tapi kami juga butuh dukungan infrastruktur dan sistem early warning yang lebih canggih agar lebih responsif terhadap iklim ekstrem.”⁸³

Dampak perubahan iklim dari sisi produksi turut dirasakan langsung oleh para petani. Ketidakpastian musim tanam dan perubahan pola curah hujan menyebabkan banyak petani gagal panen, sehingga berkontribusi pada meningkatnya ketergantungan terhadap suplai pangan dari BULOG. Petani dari Silih Nara menjelaskan pengalamannya secara rinci:

“Dulu kami bisa mengira-ngira kapan musim tanam dan panen. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Tahun lalu, saya tanam padi di Februari karena biasanya itu musim hujan. Tapi ternyata kemarau panjang, tanah jadi keras, padi tidak tumbuh maksimal. Setelah itu, saya coba tanam lagi di bulan Juli, tapi malah hujan deras waktu panen. Gabah saya busuk karena tidak sempat dijemur. Dua kali gagal dalam satu tahun. Sekarang, kami tidak berani lagi tanam sembarangan. Terpaksa beli beras dari luar, kalau tidak ada BULOG, mungkin kami sudah krisis.”⁸⁴

Kondisi ini menunjukkan bahwa perubahan iklim telah menciptakan siklus ketidakpastian di sektor pangan, di mana produksi terganggu dan distribusi pun menghadapi tantangan besar. Pemerintah daerah menyadari urgensi adaptasi terhadap iklim, seperti disampaikan oleh Kepala Bidang Penanggulangan Pangan:

“Perubahan iklim ini tidak bisa kita anggap ringan. Kami di Dinas Ketahanan Pangan sudah mulai menyusun kebijakan strategis berbasis adaptasi iklim. Misalnya, membuat peta kerentanan pangan berdasarkan data BMKG dan Badan Pangan Nasional. Tapi pelaksanaannya masih butuh banyak koordinasi. Kami butuh data real-time dari BMKG, lalu kerja sama erat dengan BULOG agar mereka juga tahu kapan dan di mana harus stok lebih awal atau tunda pengiriman. Kalau tidak ada koordinasi, intervensi pangan bisa salah sasaran.”

⁸³ Suhadi, Kepala Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 09.00 WIB.

⁸⁴ Marzuki, Petani pada Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 14.00 WIB.

“Kami juga sedang uji coba program kampung adaptif iklim yang mengintegrasikan lumbung pangan lokal dengan sistem informasi cuaca. Harapannya, petani bisa mendapatkan informasi tanam yang lebih akurat, dan BULOG juga bisa mengantisipasi distribusi ke wilayah yang kemungkinan mengalami cuaca buruk.”⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan, jelas bahwa perubahan iklim tidak hanya menjadi ancaman lingkungan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi tantangan struktural dalam sistem ketahanan pangan. Kebutuhan mendesak terhadap integrasi data cuaca, penguatan sistem logistik adaptif, dan peningkatan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat utama dalam membangun ketahanan pangan daerah yang tangguh terhadap iklim.

Upaya seperti integrasi dengan informasi iklim dari BMKG, penyusunan peta rawan pangan berbasis geospasial, serta penguatan koordinasi lintas sektor merupakan langkah awal yang perlu ditindaklanjuti dengan investasi pada teknologi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pendanaan yang berkelanjutan. Tanpa langkah adaptif yang terstruktur dan berbasis data, maka risiko krisis pangan di wilayah-wilayah seperti Aceh Tengah akan semakin tinggi di masa mendatang.

4.4 Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Perum BULOG memainkan peran strategis dalam sistem ketahanan pangan daerah, khususnya dalam konteks penanggulangan krisis pangan di Kabupaten Aceh Tengah. Tiga peran utama yang

⁸⁵ Mawardi, Kepala Bidang Penanggulangan Pangan Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, Wawancara pada Tanggal 14 Juni 2025, 11.00 WIB.

diidentifikasi meliputi: (1) penyediaan cadangan pangan, (2) distribusi pangan ke daerah rawan, dan (3) stabilisasi harga serta pasokan pangan. Ketiganya menjadi pilar fundamental yang menopang ketahanan pangan lokal, terlebih dalam kondisi geografis yang kompleks dan dinamika iklim yang tidak menentu.

Sebagai lembaga yang ditugaskan negara untuk mengelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP), BULOG telah menjalankan fungsi penyimpanan dan penyaluran beras dalam rangka menjamin ketersediaan pangan, terutama bagi kelompok masyarakat rentan. Penelitian ini memperkuat temuan sebelumnya oleh Rachman et al,⁸⁶ yang menunjukkan bahwa peran BULOG tidak hanya terbatas pada logistik, tetapi juga sebagai instrument stabilisasi sosial-ekonomi, khususnya dalam menjaga daya beli masyarakat terhadap bahan pangan pokok.

Di Kabupaten Aceh Tengah, peran ini dijalankan dengan mempertimbangkan konteks lokal. Penyediaan cadangan dilakukan melalui pengelolaan stok yang tersebar di gudang utama dan gudang pembantu. Distribusi dilakukan secara responsif, terutama saat terjadi bencana alam atau lonjakan harga. BULOG juga bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mengimplementasikan operasi pasar dalam meredam fluktuasi harga. Hal ini sejalan dengan kajian Badan Pangan Nasional,⁸⁷ yang menekankan pentingnya kolaborasi vertikal antara lembaga pusat dan daerah dalam pengelolaan cadangan pangan strategis.

⁸⁶ Rachman, B., dkk. 2021. *Strategi Stabilisasi Sosial-Ekonomi melalui Cadangan Pangan: Studi Kasus Peran BULOG*. Laporan Penelitian Internal, Perum BULOG.

⁸⁷ Badan Pangan Nasional dan World Food Programme. 2022. *Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)*. Jakarta: Bapanas & WFP.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa tantangan utama dalam pelaksanaan peran BULOG bersumber dari tiga faktor utama: (1) keterbatasan sumber daya manusia (SDM), (2) infrastruktur alam dan logistik yang tidak memadai, serta (3) dampak perubahan iklim.

Pertama, dari aspek SDM, BULOG masih menghadapi tantangan dalam hal kapasitas teknis dan adaptasi terhadap sistem logistik berbasis digital. Meskipun pelatihan telah dilakukan, distribusi kompetensi belum merata di seluruh unit operasional. Hal ini senada dengan temuan Lubis & Mustofa,⁸⁸ yang menyatakan bahwa transformasi logistik pangan di Indonesia membutuhkan investasi besar pada sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan sistem digital dan pengambilan keputusan berbasis data.

Kedua, dari sisi infrastruktur dan sumber daya alam, keterbatasan akses jalan, gudang penyimpanan, serta tantangan topografi wilayah pegunungan Aceh Tengah menghambat efektivitas distribusi. BULOG dituntut untuk memiliki fleksibilitas tinggi dalam manajemen logistik dan penempatan stok. Studi oleh Ningsih et al.⁸⁹ menunjukkan bahwa daerah dengan keterbatasan infrastruktur cenderung mengalami keterlambatan distribusi pangan dan kerentanan terhadap fluktuasi harga yang lebih tinggi.

Ketiga, perubahan iklim menjadi tantangan lintas sektor yang sangat kompleks. Petani menghadapi ketidakpastian musim tanam, sementara BULOG harus menyesuaikan jadwal distribusi dengan risiko cuaca ekstrem. Sejalan

⁸⁸ Lubis, R. A., dan H. Mustofa. 2020. "Penguatan Kapasitas SDM Dalam Manajemen Logistik Pangan di Indonesia." *Jurnal Ketahanan Pangan Nasional* 12(1): 33–42.

⁸⁹ Ningsih, R., W. Adi, dan T. Siregar. 2019. "Kebijakan Buffer Stock dan Ketahanan Pangan di Wilayah Tertinggal." *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 10(2): 75–88.

dengan kajian oleh BMKG,⁹⁰ perubahan iklim telah menyebabkan meningkatnya ketidakstabilan sistem pangan, baik dari sisi produksi maupun distribusi. Dalam konteks Aceh Tengah, banjir dan longsor menjadi hambatan reguler yang menuntut sistem logistik yang adaptif.

Kinerja BULOG dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut sangat ditentukan oleh efektivitas koordinasi lintas sektor, terutama dengan pemerintah daerah dan instansi teknis lainnya seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, serta lembaga penanggulangan bencana. Koordinasi ini diperlukan tidak hanya untuk merespons krisis yang sedang berlangsung, tetapi juga dalam merancang sistem ketahanan pangan jangka panjang yang berbasis data dan proyeksi iklim.

Kepala Bidang Penanggulangan Pangan menyatakan bahwa kolaborasi antara BULOG dan Pemda menjadi kunci dalam menurunkan risiko gagal distribusi. BULOG membutuhkan dukungan dalam bentuk kebijakan zonasi rawan pangan, data kerentanan wilayah, serta penguatan infrastruktur pendukung.

Temuan ini memperkuat hasil riset Sari et al.,⁹¹ yang menyatakan bahwa keberhasilan sistem ketahanan pangan di tingkat daerah sangat bergantung pada sinkronisasi peran antara aktor nasional dan lokal, serta tersedianya data spasial dan temporal yang mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa BULOG tidak dapat bekerja secara terisolasi, melainkan harus menjadi bagian dari ekosistem

⁹⁰ BMKG. 2022. *Proyeksi Iklim Wilayah Aceh: Risiko dan Adaptasi di Sektor Pertanian*. Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

⁹¹ Sari, A. D., B. C. Wijaya, dan D. F. Rahman. 2021. "Sinergi Nasional–Lokal dalam Sistem Ketahanan Pangan Daerah: Analisis Data Spasial dan Temporal untuk Kebijakan Berbasis Bukti." *Jurnal Kebijakan Pangan dan Gizi* 5 (2): 85–104.

kebijakan pangan yang terintegrasi. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan fisik pangan, tetapi juga tentang akses, distribusi yang adil, stabilitas harga, serta keberlanjutan sistem produksi dan logistik. Dengan penguatan kapasitas SDM, dukungan kebijakan daerah, serta inovasi adaptif terhadap risiko iklim, maka peran BULOG dapat lebih optimal dalam menjamin ketahanan pangan daerah, khususnya di wilayah rentan seperti Aceh Tengah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui analisis data empiris dan wawancara dengan para informan kunci, dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Perum BULOG dalam Penanggulangan Krisis Pangan di Kabupaten Aceh Tengah

Perum BULOG memiliki peran strategis dalam memastikan ketahanan pangan melalui tiga fungsi utama: penyediaan cadangan pangan, distribusi ke wilayah rawan, dan stabilisasi harga pangan. BULOG bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lintas sektor untuk memastikan ketersediaan pangan di tengah tantangan geografis dan lonjakan permintaan, terutama saat krisis. Keberadaan gudang pembantu dan program Operasi Pasar menjadi bentuk adaptasi konkret dalam menjaga pasokan dan keterjangkauan pangan.

2. Tantangan yang Dihadapi Perum BULOG dalam Menangani Krisis Pangan

Tantangan utama yang dihadapi BULOG mencakup keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur logistik yang belum memadai, serta dampak perubahan iklim. Distribusi ke daerah terpencil seringkali terhambat oleh kondisi jalan yang rusak dan cuaca ekstrem, yang berisiko terhadap keterlambatan dan penurunan kualitas bahan pangan. Selain itu, masih terdapat kebutuhan peningkatan kapasitas teknis dan adaptasi sistem

logistik terhadap data cuaca dan iklim. Tantangan-tantangan ini menunjukkan pentingnya kolaborasi antara BULOG, pemerintah daerah, dan lembaga teknis lain dalam memperkuat sistem ketahanan pangan yang tangguh dan responsif terhadap krisis.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, berikut beberapa saran yang dapat diberikan:

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Perum BULOG perlu terus melakukan pelatihan teknis dan manajerial bagi stafnya, terutama dalam penggunaan teknologi logistik dan pemetaan wilayah rawan pangan. Hal ini penting agar respons terhadap krisis pangan lebih cepat dan tepat sasaran.

2. Penguatan Infrastruktur dan Logistik

Perum BULOG bersama dengan pemerintah daerah, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), serta Dinas Perhubungan perlu melakukan pengembangan gudang tambahan di daerah-daerah strategis. Selain itu, mereka juga perlu meningkatkan aksesibilitas jalan ke wilayah-wilayah terpencil guna menjamin kelancaran distribusi pangan, khususnya ke daerah rawan pangan dan sulit dijangkau.

3. Integrasi Sistem Informasi Iklim dan Pangan

Perum BULOG, bekerja sama dengan pemerintah daerah dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), perlu mengembangkan sistem peringatan dini serta perencanaan logistik

berbasis data iklim. Langkah ini penting untuk menghadapi ketidakpastian cuaca dan dampak perubahan iklim yang dapat mengganggu produksi dan distribusi pangan secara nasional maupun daerah.

4. Kolaborasi Lintas Sektor

Pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi lintas sektor, termasuk dengan Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan lembaga swadaya masyarakat dalam merancang kebijakan penanggulangan krisis pangan yang inklusif dan berkelanjutan.

5. Pemberdayaan Petani Lokal

Perlu adanya program dukungan langsung kepada petani, seperti akses pupuk, irigasi, dan pasar, agar produksi lokal dapat ditingkatkan dan ketergantungan terhadap cadangan pangan nasional dapat diminimalisir, terutama di masa krisis.

Saran-saran tersebut diharapkan dapat menjadi dasar kebijakan dan praktik yang lebih adaptif dan tangguh dalam menjaga ketahanan pangan di wilayah Aceh Tengah.



DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2014, Juni 19). *Ketahanan pangan*. Perum BULOG Nasional. <http://180.250.19.213/ketahananpangan.php>
- Afriadi. (2018). *Peranan Majelis Taklim dalam pemberdayaan masyarakat Islam di Desa Payabenua Kecamatan Mendi Barat Bangka Belitung* [Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung]. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Akmalia, H. A. (2023). The impact of climate change on agriculture in Indonesia and its strategies. *Agritepa*, 9(1), 1–12. <https://doi.org/10.37676/agritepa.v9i1.1691>
- Arghniya, N. S. (2022). *Peran pemerintah daerah dalam penanganan kerawanan pangan masyarakat Kota Jantho Kabupaten Aceh Besar (Studi implementasi kebijakan berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar)* [Skripsi, Universitas Syiah Kuala].
- Badan Pangan Nasional & World Food Programme. (2022). *Food security and vulnerability atlas (FSVA)*. Jakarta: Bapanas & WFP.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh. (2022). *Indikator tenaga kerja Provinsi Aceh Februari 2022*. <https://aceh.bps.go.id/id/publication/2022/07/29/6421a97c727e37fee4093c44/labor-indicators-of-aceh-province--february-2022.html>
- Biddle, B. J. (2013). *Role theory: Expectations, identities, and behaviors* (Revised ed.). Academic Press.
- BMKG. (2022). *Proyeksi iklim wilayah Aceh: Risiko dan adaptasi di sektor pertanian*. Jakarta: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- BPS Kabupaten Aceh Tengah. (2023). *Kabupaten Aceh Tengah dalam angka 2023*. Takengon: BPS.
- Dianti, A. R., & Sari, A. D. (2024). Analisis strategi logistik pengadaan beras dalam menunjang ketahanan pangan di GBB Klaten. *Jurnal Logistik Bisnis*, 14(1), 112–124. <https://doi.org/10.46369/logistik.v14i1.3624>
- Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah. (2023). *Laporan pemetaan wilayah rentan pangan Kabupaten Aceh Tengah*. Takengon: Pemerintah Daerah Aceh Tengah.

- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- FAO. (2023). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2023*. <https://doi.org/10.4060/cc3017en>
- Hardiansyah. (2011). *Kualitas pelayanan publik: Konsep, dimensi, indikator, dan implementasinya*. Yogyakarta: Gava Media.
- Hasanah, H. (2016, Juli). Teknik-teknik observasi (sebuah alternatif metode pengumpulan data kualitatif ilmu-ilmu sosial). *Jurnal At-Taqaddum*, 8(1), 21–46.
- Kementerian Pertanian. (2021). *Profil ketahanan pangan Provinsi Aceh*. Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
- Lantaeda, S. B., Lengkong, F. D., & Ruru, J. M. (2017). Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam penyusunan. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(048), 1–9.
- Lega, M. (2023). *Implementasi kebijakan ketahanan pangan di Kabupaten Sleman (Studi penelitian di Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Dinas Pertanian Pemerintah Kabupaten Sleman)* [Skripsi, Universitas Gadjah Mada].
- Lestari, A. D., Nugroho, R., & Putra, M. S. (2021). Perubahan iklim dan ketahanan pangan: Strategi adaptasi sektor pertanian di Indonesia. *Jurnal Administrasi Terapan*, 6(2), 120–132. <https://doi.org/10.25105/jat.v6i2.11553>
- Lubis, R. A., & Mustofa, H. (2020). Penguatan kapasitas SDM dalam manajemen logistik pangan di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Pangan Nasional*, 12(1), 33–42.
- Mansyur. (2025, Juni 14). Wawancara langsung. Petani, Kabupaten Aceh Tengah, pukul 15.00 WIB.
- Mawardi. (2025, Juni 14). Wawancara langsung. Kepala Bidang Penanggulangan Pangan Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, pukul 11.00 WIB.
- Miftahul, Q. (2021). *Strategi peningkatan ketahanan pangan rumah tangga nelayan Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan* [Skripsi, Institut Teknologi Kalimantan]. Institut Teknologi Kalimantan.

- Moleong, L. J. (2007). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mukmin, H. (2014). *Peranan Fakultas Dakwah sebagai lembaga dakwah kampus dalam pemberdayaan masyarakat Islam di wilayah Lampung* [Skripsi, IAIN Raden Intan Lampung]. IAIN Raden Intan Lampung.
- Nh. (2022, Juli 20). *Berita*. Dinas Pertanahan dan Perkebunan Aceh. Diambil 21 November 2022, dari <https://distanbun.acehprov.go.id/berita/kategori/berita/penurunan-kemiskinan-aceh-dinilai-dampak-kenaikan-produksi-padi-angka-kemiskinan-capai-21-85-persen>
- Ningsih, R., Adi, W., & Siregar, T. (2019). Kebijakan buffer stock dan ketahanan pangan di wilayah tertinggal. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 75–88.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2015). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perusahaan Umum (Perum) BULOG*. Jakarta: Sekretariat Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5734>
- Perum BULOG Nasional. (2022). *Ketahanan pangan*. <http://180.250.19.213/ketahananpangan.php>
- Prasetyo, R. A., & Santosa, A. (2020). Evaluasi peran BULOG dalam menstabilkan harga pangan pokok di masa pandemi COVID-19. *Jurnal Kebijakan Publik dan Administrasi*, 7(2), 101–115. <https://doi.org/10.1234/jkpa.v7i2.2020>
- Puadi, M. (2025, Juni 14). Wawancara langsung. Kepala Bidang Logistik Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, pukul 10.00 WIB.
- Pusat Data dan Informasi Perum BULOG. (2023). *Laporan operasional BULOG wilayah Aceh Tengah*. Takengon: Perum BULOG.
- Rachman, B., dkk. (2021). *Strategi stabilisasi sosial-ekonomi melalui cadangan pangan: Studi kasus peran BULOG*. Laporan penelitian internal, Perum BULOG.
- Ramadhani, D., & Fauziah, N. (2022). Ketahanan pangan lokal dalam perspektif krisis iklim: Studi kasus di Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Ketahanan Pangan*, 14(1), 45–59. <https://doi.org/10.21009/jkp.2022.14.1.4>

- Sahri, R. (2022, Juli 29). *Berita*. Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah. Diambil 21 November 2022, dari <https://dinaspangan.acehtengahkab.go.id/berita/kategori/kerawanan-pangan/peta-ketahanan-dan-kerentanan-pangan-food-security-and-vulnerability-atlas-fsva-aceh-tengah-tahun-2022>
- Sarah, S. (2022). *Implementasi kebijakan penertiban hewan ternak di Kecamatan Darul Imarah* [Skripsi, UIN Ar-Raniry]. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry.
- Sari, A. D., Wijaya, B. C., & Rahman, D. F. (2021). Sinergi nasional-lokal dalam sistem ketahanan pangan daerah: Analisis data spasial dan temporal untuk kebijakan berbasis bukti. *Jurnal Kebijakan Pangan dan Gizi*, 5(2), 85–104.
- Siregar, F. R., Kurniawan, A. H., & Prasetyo, R. (2023). Strategi ketahanan pangan berbasis cadangan pangan pemerintah. *Jurnal Manajemen dan Bisnis Krisnadwipayana*, 12(1), 56–68. <https://doi.org/10.24843/JMBK.2023.v12.i01.p06>
- Sugiyono. (2013). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhadi. (2025, Juni 14). Wawancara langsung. Kepala Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah, pukul 09.00 WIB.
- Suhono, T., & Al Fatta, H. (2021). Penyusunan data primer sebagai dasar interoperabilitas sistem informasi pada pemerintah Kabupaten Purworejo. *Jnanaloka*, 2(1), 35–43.
- Susanti, H., & Rahmat, A. (2023). Peran pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas pangan di wilayah rawan krisis. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 11(3), 88–102. <https://doi.org/10.31219/osf.io/k97cn>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39100>
- Utomo, B. (2020). Tantangan dan peran BULOG di era industri 4.0. *Jurnal Pangan Indonesia*, 9(2), 101–110.
- WFP. (2022). *Shock-responsive safety nets for food crisis mitigation*. <https://www.wfp.org/publications/shock-responsive-social-protection>
- Yusra, L., & Hidayati, M. (2021). Analisis strategi ketahanan pangan berbasis komunitas di daerah pesisir. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 9(2), 121–135. <https://doi.org/10.24198/jsep.v9i2.2021>

LAMPIRAN

Lampiran I: Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : B-1108/Un.08/FISIP.I/PP.00.9/06/2025

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Perum BULOG Kabupaten Aceh Tengah

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 180802059

Nama : ASTRANI GINTING

Program Studi/Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Alamat : Komplek P.U Baro Raya 2, Jalan Sigli - Garot Desa Paloh Pidie

Sandara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PERAN PERUM BULOG DALAM PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH**

Banda Aceh, 18 Juni 2025

An. Dekan

Wakil Dekan, Bidang Akademik dan Kelembagaan



Eka Januar, M.Soc.Sc.

NIP. 198401012015031003

Berlaku sampai : 27 Oktober 2025

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran II: Draf Wawancara Informan

PERAN PERUM BULOG DALAM PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN DI KABUPATEN ACEH TENGAH

1. Kepala Perum BULOG

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Krisis Pangan	Cadangan Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana strategi Perum BULOG dalam menjaga ketersediaan cadangan pangan di Kabupaten Aceh Tengah?2. Bagaimana mekanisme penyimpanan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam menghadapi potensi krisis pangan?
	Distribusi Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana sistem distribusi pangan yang diterapkan oleh BULOG untuk menjangkau wilayah rawan dan terpencil?2. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam pendistribusian pangan, dan bagaimana solusi yang dilakukan?
	Stabilitas Pangan	<ol style="list-style-type: none">1. Apa peran BULOG dalam menjaga stabilitas harga pangan di pasar lokal saat terjadi gejolak harga?2. Bagaimana efektivitas operasi pasar yang dilakukan BULOG dalam menekan lonjakan harga kebutuhan pokok?
Faktor Penghambat	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none">1. Bagaimana kondisi dan peran sumber daya manusia dalam mendukung pelaksanaan tugas BULOG di wilayah ini?2. Apa upaya BULOG dalam meningkatkan kapasitas SDM untuk mendukung ketahanan pangan di tengah tantangan yang ada?
	Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none">1. Apakah keterbatasan sumber daya alam mempengaruhi ketersediaan dan distribusi pangan di Aceh Tengah?2. Bagaimana peran BULOG dalam mendukung pemanfaatan dan perlindungan

		sumber daya alam lokal untuk mendukung ketahanan pangan?
	Iklm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana dampak perubahan iklim terhadap kelancaran distribusi dan penyimpanan pangan yang dilakukan oleh BULOG? 2. Apa bentuk antisipasi atau mitigasi risiko yang dilakukan BULOG dalam menghadapi gangguan pangan akibat faktor iklim dan cuaca?

2. Kepala Bidang Penanggulangan Pangan

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Krisis Pangan	Cadangan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran pemerintah daerah dalam mendukung penyediaan dan pengawasan cadangan pangan di Kabupaten Aceh Tengah? 2. Sejauh mana koordinasi antara Pemda dan Perum BULOG dalam memastikan ketahanan cadangan pangan saat kondisi krisis?
	Distribusi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme distribusi pangan pokok yang diterapkan oleh Pemda selama terjadi krisis pangan? 2. Apa peran pemerintah daerah dalam menjamin kelancaran distribusi pangan ke daerah terpencil dan rawan pangan?
	Stabilitas Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa bentuk intervensi atau kebijakan daerah untuk menstabilkan harga dan pasokan pangan pokok di pasaran? 2. Bagaimana efektivitas program stabilisasi pangan daerah dalam membantu masyarakat rentan saat terjadi lonjakan harga?
Faktor Penghambat	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kapasitas SDM di lingkup Pemda menjadi faktor yang mempengaruhi penanggulangan krisis pangan? 2. Apa program pelatihan atau penguatan kapasitas SDM yang telah dilakukan untuk

		mendukung ketahanan pangan daerah?
	Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Pemda melihat keterkaitan antara pengelolaan sumber daya alam dan ketahanan pangan daerah? 2. Apa kebijakan Pemda untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam sebagai pendukung utama sistem pangan lokal?
	Iklm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa dampak yang paling dirasakan akibat perubahan iklim terhadap sistem pangan di Kabupaten Aceh Tengah? 2. Bagaimana strategi atau kebijakan adaptif yang dilakukan Pemda dalam mengantisipasi gangguan pangan akibat perubahan iklim?

3. Kepala Bidang Logistik

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Krisis Pangan	Cadangan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana sistem pengelolaan cadangan pangan (CBP) di gudang BULOG Aceh Tengah dalam mendukung penanggulangan krisis pangan 2. Bagaimana proses pemantauan kondisi dan rotasi stok cadangan pangan dilakukan untuk menjaga kualitas dan ketersediaan pangan?
	Distribusi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana alur distribusi logistik pangan dari gudang ke titik distribusi selama masa krisis? 2. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam proses distribusi logistik pangan, terutama ke wilayah terpencil atau rawan bencana?
	Stabilitas Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana peran logistik dalam mendukung kelancaran operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga pangan? 2. Sejauh mana koordinasi logistik mendukung intervensi pasar BULOG saat terjadi lonjakan harga pangan pokok di Aceh Tengah?
Faktor Penghambat	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana kapasitas SDM di bidang logistik dalam menangani pengelolaan dan distribusi pangan secara efektif dan efisien? 2. Apa saja pelatihan atau penguatan kapasitas yang diberikan kepada staf logistik untuk

		menghadapi kondisi krisis pangan?
	Sumber Daya Alam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah kondisi geografis dan infrastruktur alam memengaruhi distribusi logistik pangan di Aceh Tengah? 2. Bagaimana strategi logistik dalam mengantisipasi hambatan medan seperti daerah pegunungan atau akses jalan terbatas?
	Iklm	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana cuaca ekstrem atau perubahan iklim mempengaruhi proses penyimpanan dan pengangkutan pangan? 2. Apa langkah mitigasi logistik yang dilakukan BULOG dalam menghadapi risiko iklim, seperti banjir atau longsor, yang berdampak pada distribusi?

4. Petani

Dimensi	Indikator	Pertanyaan Wawancara
Krisis Pangan	Cadangan Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda pernah mengalami kekurangan pangan atau kesulitan memperoleh bahan pokok saat masa paceklik atau gagal panen? 2. Menurut Anda, apakah ketersediaan pangan di daerah Anda cukup saat terjadi krisis atau gangguan produksi pertanian?
	Distribusi Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda merasa distribusi pangan pokok dari pemerintah atau BULOG sudah merata dan tepat sasaran ke desa Anda? 2. Apa kendala yang Anda rasakan dalam akses terhadap pangan pokok saat terjadi gangguan pasokan atau distribusi?
	Stabilitas Pangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana perubahan harga pangan (seperti beras) memengaruhi kehidupan Anda sebagai petani saat krisis? 2. Menurut Anda, apakah bantuan pemerintah atau program operasi pasar membantu menstabilkan harga dan kebutuhan pangan keluarga Anda?
Faktor Penghambat	Sumber Daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah Anda merasa keterbatasan pengetahuan atau pelatihan pertanian berpengaruh terhadap produktivitas

		<p>pertanian Anda?</p> <p>2. Apakah Anda mendapatkan dukungan dari penyuluh pertanian atau pihak terkait untuk meningkatkan hasil dan ketahanan pangan di desa?</p>
Sumber Alam	Daya	<p>1. Bagaimana kondisi lahan pertanian dan air di wilayah Anda? Apakah memadai untuk mendukung pertanian secara berkelanjutan?</p> <p>2. Apakah terjadi penurunan hasil panen karena perubahan kondisi alam atau keterbatasan sumber daya pertanian?</p>
Iklm		<p>1. Bagaimana dampak perubahan iklim, seperti musim tanam tidak menentu atau kekeringan, terhadap hasil panen Anda?</p> <p>2. Apa harapan Anda kepada pemerintah atau BULOG untuk membantu petani menghadapi dampak perubahan iklim terhadap ketahanan pangan?</p>



Lampiran III: Dokumentasi

